



# ► Ikhtisar Penelitian

October 2020

## ► Efek Riak Rantai Pasok: Bagaimana COVID-19 memengaruhi para pekerja dan pabrik sektor garmen di Asia dan Pasifik \*

### Poin-poin Penting

- Krisis COVID-19 memukul sektor garmen di Asia dan Pasifik sangat berat, memengaruhi jutaan orang pekerja dan banyak perusahaan di rantai pasok, dan terlihat ada 'efek riak' terjadi dalam berbagai dimensi.
- Sampai bulan September 2020, sekitar satu dari dua orang pekerja sektor garmen yang tinggal di negara-negara yang mewajibkan penutupan tempat kerja termasuk pabrik garmen, kecuali tempat kerja sektor esensial. **Hampir setengah dari semua pekerjaan di rantai pasok garmen di Kawasan ini bergantung pada permintaan konsumen dalam negeri ataupun luar negeri** dari negara-negara dengan kebijakan lockdown yang jauh lebih ketat, dimana terlihat juga penurunan nilai penjualan yang tajam.
- **Perdagangan garmen global lumpuh pada paruh pertama tahun 2020.** Pada beberapa kasus, impor dari negara-negara produsen garmen Asia ke negara-negara pembeli utama turun hingga sebesar 70 persen. Pembatalan pesanan pembeli merupakan hal yang umum terjadi saat krisis mulai. Manufaktur garmen juga mengalami disrupsi hingga 60 persen dari pasokan input impor mereka.
- Dengan ditutupnya ribuan pabrik pemasok, baik yang sementara waktu maupun selamanya, pemutusan hubungan kerja dan pemecatan menjadi sesuatu yang jamak terjadi. Pabrik-pabrik yang buka Kembali juga mengalami penurunan kapasitas Angkatan kerja. **Rata-rata pekerja kehilangan setidaknya dua hingga empat minggu kerja, dan hanya tiga dari lima orang yang dipanggil Kembali bekerja.** Dari mereka yang masih dipekerjakan pada kuartal ke dua tahun 2020, penurunan pendapatan dan penundaan pembayaran upah menjadi hal yang umum terjadi.
- **Sebagian besar pekerja sektor garmen di Kawasan ini adalah perempuan dan mereka terdampak secara disproportional oleh krisis**—semakin memperburuk ketimpangan pada beban kerja, pemisahan pekerjaan, distribusi pekerjaan perawatan tak berbayar dan pendapatan.
- **Meskipun banyak pabrik yang mengambil langkah untuk mengupayakan risiko untuk meminimalisir risiko infeksi COVID-19, pada beberapa kasus, langkah-langkah kesehatan dan keselamatan kerja dilaksanakan secara tidak konsisten.**
- Sektor garmen di beberapa negara terus menunjukkan rendahnya tingkat perundingan bersama dan pembatasan signifikan dari kebebasan berserikat. **Dialog sosial efektif hanya di negara-negara yang memiliki struktur atau inisiatif dialog sosial.**
- **Pemerintah-pemerintah di Kawasan ini merespon krisis dengan membantu pekerja dan perusahaan di berbagai dimensi,** namun masih perlu ditelaah apakah bantuan ini mencukupi atau tidak. **Seruan Aksi (Call to Action) global merupakan upaya industry yang luas untuk membantu perusahaan dan pekerja saat menghadapi krisis,** dimana para pemangku kepentingan sektor garmen perlu berkomitmen untuk menindaklanjuti dan bertindak.
- **Rekomendasi dan perangkat kebijakan ILO dapat memberikan panduan lebih dalam bagi pemerintah dan para mitra sosial** seiring dengan berjalannya krisis, dan membantu industry membangun masa depan yang lebih berketahanan dan berkelanjutan pasca COVID-19.

\* Ikhtisar penelitian ini ditulis oleh James Lowell Jackson, Jason Judd (both Cornell University, New Conversations Project in the School of Industrial and Labor Relations) and Christian Viegelahn (Regional Economic and Analysis Unit (RESA), ILO Regional Office for Asia and the Pacific). It is an output of a joint research project of ILO with Cornell University, coordinated by Jeffrey Eisenbraun, Arianna Rossi (both Better Work), Christian Viegelahn (RESA) and David Williams (ILO-SIDA Decent Work in Garment Supply Chains Asia project).

## ► Pengantar

Tujuan dari ikhtisar ini adalah untuk mengkaji dampak krisis COVID-19 terhadap pekerja dan pabrik-pabrik pada rantai pasok sektor garmen di Asia dan Pasifik. <sup>1</sup> Dengan banyaknya negara di dunia mencatatkan puncak virus dan gelombang ke dua muncul di negara-negara yang sebelumnya dapat mengendalikan insiden penularan, krisis COVID-19 terus memukul telak industry ini, memengaruhi ribuan pabrik dan jutaan pekerja di pusat-pusat produksi di Asia.

Kawasan Asia Pasifik rentan menghadapi dampak buruk krisis ini terhadap industry garmen, karena 60 persen ekspor pakaian jadi dunia—fakta yang membuat Kawasan ini diberi julukan “pabrik pakaian dunia”—datang dari Kawasan ini (ILO, 2017).<sup>2</sup> Di beberapa negara di Kawasan ini, sektor garmen mencakup lebih dari setengah sektor manufaktur. value-added and goods exports.

atau 75 persen dari seluruh pekerja di seluruh dunia. <sup>3</sup>

Secara keseluruhan, sektor garmen mencakup 3,4 persen total tenaga kerja di Kawasan ini (dibandingkan dengan proporsi tenaga kerja di luar Kawasan ini yang hanya 1,6 persen), atau 21,1 persen tenaga kerja sektor manufaktur. Proporsi pekerja sektor garmen terhadap total tenaga kerja tertinggi di Asia Selatan (4,3 persen), diikuti Asia Tenggara dan Pasifik (3,7 persen) dan Asia Timur (2,6 persen).

Sebagian besar pekerja garmen adalah perempuan (35 juta), dan sektor garmen mempekerjakan 5,2 persen dari semua perempuan pekerja di Kawasan ini, atau 27,9 persen dari semua perempuan yang bekerja di sektor manufaktur. Satu dari lima orang perempuan di Kamboja yang bekerja, bekerja untuk sektor garmen (Gambar 2). Di Pakistan dan Sri Lanka, sekitar satu dari tujuh orang perempuan bekerja di sektor ini dan satu dari Sembilan perempuan di Bangladesh dan Myanmar. Di negara-negara lain di Kawasan ini, proporsi ketenagakerjaan perempuan lebih tinggi dari proporsi sektor ini terhadap ketenagakerjaan secara keseluruhan. <sup>4</sup>

► **Gambar 1. Sektor garmen mencakup proporsi besar ekspor dan nilai tambah manufaktur**

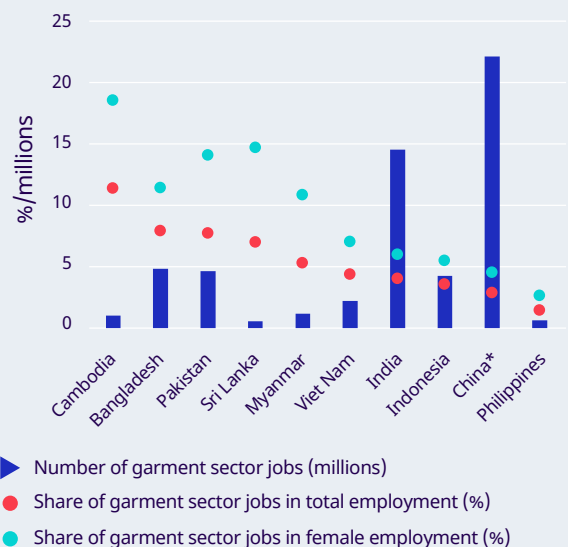


**Catatan:** Data mengenai ekspor dan nilai tambah merujuk pada ISIC 13-15.  
**Sumber:** UNCTAD, World Bank World Development Indicators database diambil dari UNIDO International Yearbook of Industrial Statistics.

## Beberapa Angka Ketenagakerjaan Penting

Sektor garmen di Kawasan Asia dan Pasifik merupakan sumber pendapatan dan ketenagakerjaan penting, termasuk pekerjaan formal dan informal. Pada tahun 2019, Kawasan ini diperkirakan mempekerjakan 65 juta pekerja sektor garmen

► **Gambar 2. Jutaan pekerja dipekerjakan di sektor garmen; Sebagian besar adalah perempuan**



**Catatan:** Data yang dipaparkan untuk Tiongkok adalah estimasi ILO untuk 2019. Semua poin data berdasarkan pada data terkini dari survei Angkatan kerja nasional. Data merujuk pada ISIC 13-15.  
**Sumber:** ILOSTAT.

1 Kecuali dinyatakan sebaliknya, “garmen” atau “sektor garmen” merujuk pada industry dengan kode ISIC 13-15.  
 2 Perhitungan ILO berdasarkan UNCTAD  
 3 Estimasi ILO berdasarkan survei data tenaga kerja. Untuk rincian metodologis, lihat Lampiran C ILO (2020c). Estimasi regional termasuk semua negara di Kawasan.  
 4 Karena Sebagian besar pekerja ini adalah imigran internal, krisis ini juga meningkatkan pertumbuhan alur balik pekerja, seringkali ke daerah pedesaan (Fair Wear Foundation, 2020). Dengan beberapa pengecualian, pekerja migran asing jarang bekerja di sektor garmen di Sebagian besar negara di Kawasan.

## Mengkaji 'efek riak' krisis ini

Kawasan Asia dan Pasifik merupakan Kawasan pertama yang merasakan dampak krisis COVID-19. Tak lama sejak infeksi pertama tercatat di Tiongkok, virus ini menyebar di Kawasan ke Thailand, Republik Korea dan Jepang, sebelum akhirnya banyak kasus yang terdeteksi di bagian lain dunia. Perkembangan ini mendorong pemerintah-pemerintah di Kawasan ini dan dunia untuk memberlakukan berbagai langkah-langkah yang sebelumnya tak pernah mereka duga seperti penutupan tempat kerja dan toko serta pembatasan perjalanan untuk meredam penyebaran virus lebih jauh lagi.

Disrupsi rantai pasok yang berkaitan dengan COVID-19 yang bermula pada satu lokasi akan mendatangkan 'efek riak' di seluruh rantai pasok (ILO, 2020a, 2020b). Dampak-dampak kumulatif krisis ini pada rantai pasok sektor garmen karenanya sangat luas dan kompleks. Produksi garmen tidak hanya memenuhi pasar konsumen dalam negeri, namun sejumlah besar pekerja dan manufaktur melekat pada rantai pasok global yang menghasilkan garmen untuk brand fashion internasional yang berbasis di Eropa, Jepang, Amerika Utara dan tempat lain. Dengan demikian, banyak pekerjaan ini yang bergantung pada permintaan global untuk pakaian jadi konsumen dan lingkungan pengecer yang stabil tidak hanya untuk pasar domestic, namun juga untuk

pasar luar negeri.<sup>5</sup> Pekerja dan manufaktur dalam industry ini sangat bergantung pada aliran bahan mentah yang dapat diandalkan dalam industry ini untuk produksi, dan seringkali didapatkan dari pemasok asing.

## Struktur Ikhtisar

Bagian I dari ikhtisar ini membahas mengenai tiga jalur COVID-19 memengaruhi rantai pasok garmen dan pabrik serta pekerjanya, memaparkan estimasi untuk Kawasan Asia dan Pasifik sebagai suatu kesatuan. Bagian berikut membahas bukti empiris yang tersedia mengenai dampak nyata dari krisis COVID-19 pada sepuluh negara produsen garmen terbesar di Kawasan ini: Bangladesh, Kamboja, Tiongkok, India, Indonesia, Myanmar, Pakistan, Filipina, Sri Lanka dan Viet Nam. Bagian II fokus pada dampak terhadap ekspor dan pesanan para pembeli. Bagian III memaparkan dampak terhadap pasar tenaga kerja—mencakup penutupan pabrik, ketenagakerjaan, upah, gender, keselamatan dan kesehatan serta kebebasan berserikat. Bagian IV merangkum kebijakan dan inisiatif yang pemerintah dan para mitra sosial di Kawasan ini terapkan untuk memitigasi dampak buruk krisis. Ikhtisar ini kemudian menampilkan proposal untuk langkah ke depan, mengingat ada seruan terkini untuk secara bersama-sama berpikir ulang dan merancang ulang industry garmen global pasca pandemic.

## ► Bagian I: Jalur Dampak Utama krisis COVID-19

Karena pandemi global telah mengubah hampir semua segi kehidupan sosial dan ekonomi di Kawasan ini, dampak krisis COVID-19 terhadap rantai pasok garmen terjadi melalui tiga jalur utama ini:

### Penutupan Pabrik

Pertama, Pemerintah mengeluarkan perintah penutupan wajib untuk tempat-tempat kerja non-esensial, di banyak kasus hal ini termasuk pabrik garmen. Pada 9 September 2020, 5 dari 33 negara atau teritori di Kawasan yang memiliki data masih mewajibkan penutupan semua tempat kerja kecuali tempat-tempat kerja esensial setidaknya di berbagai tempat di negara tersebut.<sup>6</sup> Lebih dari 31 juta pekerja sektor garmen (48 persen pekerjaan di sektor garmen di Kawasan ini) tinggal di negara-negara ini (Gambar 3). Ini lebih sedikit dari data pada bulan April, ketika 20 negara atau teritori menerapkan kebijakan itu, dimana 56 juta pekerja (86 persen) tinggal

### Turunnya permintaan Konsumen

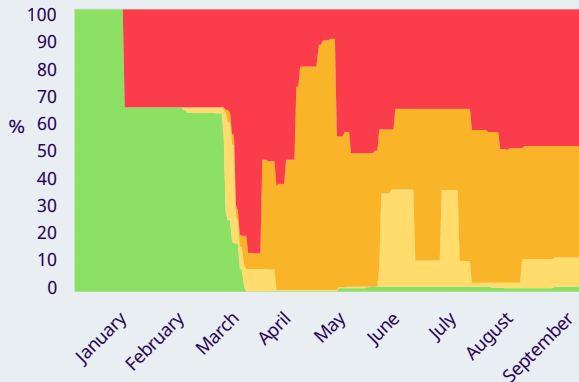
Jalur kedua terjadinya dampak krisis COVID-19 terhadap rantai pasok garmen adalah penurunan tajam permintaan konsumen global. Penurunan yang mendadak didorong oleh hilangnya daya beli, semakin meningkatnya ketidakpastian yang menahan konsumsi, dan langkah-langkah pembatasan gerak (lockdown) misalnya penutupan toko pakaian atau berbagai bentuk pembatasan perjalanan lain. Kepercayaan konsumen global jatuh dengan kecepatan sangat tinggi pada bulan Maret dan April 2020 dan belum pulih sampai sekarang (ILO, 2020a). meskipun di beberapa negara terlihat ada pelonggaran, langkah-langkah lockdown yang lebih ketat yang berkaitan dengan COVID-19 tetap ada di banyak negara yang menjadikan keketatan di seluruh dunia berada di tingkat yang tinggi.

Ada hubungan yang jelas antara keketatan langkah-langkah lockdown dan permintaan konsumen: di negara dengan langkah lockdown yang paling ketat, pertumbuhan penjualan retail tahunan mengalami penurunan lebih dari 25 poin persentase. Perbedaannya 10 poin persentase dengan negara-negara yang memiliki derajat keketatan yang lebih menengah (ILO, 2020a).

5 Estimasi ILO berdasarkan Tabel Input-Output Antar Negara OECD yang menyiratkan bahwa setidaknya satu dari dua rantai pasok garmen berkontribusi pada produksi garmen yang tujuannya pasar luar negeri dan bukan konsumsi dalam negeri.

6 Oxford COVID-19 Government Response Tracker tidak membedakan pembatasan yang memengaruhi hanya Sebagian kecil wilayah geografis suatu negara dan pembatasan yang memengaruhi seluruh negara.

**Gambar 3. Jutaan pekerja sektor garmen di Kawasan ini tinggal di negara-negara dengan penutupan tempat kerja wajib**



Proporsi pekerja garmen yang hidup di negara-negara yang...

- ▶ ...mewajibkan penutupan semua tempat kerja kecuali yang esensial
- ▶ ...mewajibkan penutupan tempat kerja untuk beberapa sektor
- ▶ ...merekomendasikan penutupan tempat kerja
- ▶ ...tidak melakukan apapun

**Catatan:** sektor garmen termasuk ISIC 13-15. Angka ini berdasarkan data untuk 33 negara atau Kawasan di Kawasan Asia pasifik.

**Sumber:** Perhitungan ILO berdasarkan basis data Oxford COVID-19 Government Response Tracker database dan estimasi modeling ILO.

Di 16 negara atau teritori dalam Kawasan ini yang memiliki estimasinya, dimana 87 persen Angkatan kerja Kawasan ini berada, diperkirakan 60 juta orang pekerja bekerja di rantai pasok sektor garmen (didefinisikan sebagai pekerjaan yang bergantung pada permintaan konsumen dalam negeri dan asing untuk sektor garmen).<sup>7</sup> Termasuk pekerjaan-pekerjaan di sektor garmen, namun juga di sektor-sektor yang memasok sektor garmen, misalnya sektor pertanian (katun, rami, atau sutra), sektor bahan kimia (pewarna atau bahan kimia lain untuk pemrosesan garmen) atau sektor jasa lain (desain, pemasaran). Ketika permintaan sektor garmen turun, para pekerja di seluruh rantai pasok garmen pun terpengaruhi.

Sampai 9 September 2020, 49 persen dari semua pekerjaan di rantai pasok garmen (29 juta) bergantung pada permintaan garmen dari konsumen yang tinggal di negara-negara dengan kebijakan lockdown yang lebih ketat dimana penjualan eceran mengalami penurunan drastic (Gambar 4). Proporsi ini lebih rendah dari angka maksimalnya pada awal April, namun tetap stabil dalam beberapa minggu terakhir. Para pekerja dalam pekerjaan ini mungkin akan kehilangan pekerjaan, jam kerja ataupun pendapatan.

Sebanyak 31 juta pekerjaan (51 persen) bergantung pada permintaan konsumen pada negara-negara dengan tingkatan lockdown menengah. Pekerjaan-pekerjaan ini mungkin mengalami efek samping yang buruk mengingat turunnya penjualan retail pada segmen negara-negara ini, meskipun pada tingkatan yang lebih rendah. Hanya 240.000 pekerjaan (0,4 persen) bergantung pada penjualan di negara-negara dengan pembatasan lockdown yang rendah, dimana dampak terhadap permintaan konsumen mungkin terbatas.

## Sumbatan Rantai Pasok

Rantai pasok garmen juga terdampak oleh penutupan tempat kerja di luar negeri, yang menimbulkan jalur dampak ke tiga—sumbatan pada rantai pasok. Penutupan tempat kerja di banyak kasus menimbulkan gangguan rantai pasok dan mencegah importasi produksi garmen tiba tepat waktu. Penurunan inventarisasi masukan dapat menjadi hambatan yang serius dalam menjaga produksi garmen dan pekerja garmen mendapatkan pendapatan—tanpa memandang apakah pandemic terkendali di negara tempat pabrik berada.

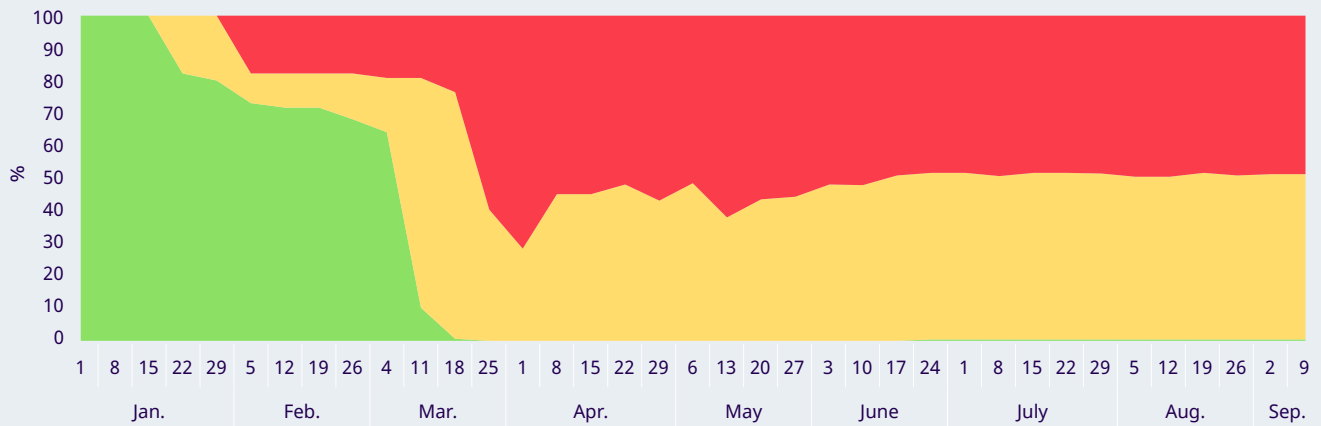
Sektor garmen di negara-negara yang sangat bergantung pada pasokan impor dibandingkan dalam negeri, dan basis pemasoknya sangat terkonsentrasi pada satu atau sedikit negara, lebih rentan mengalami disrupsi pasokan bahan impor. Dalam hal ini, sektor garmen di Asia Tenggara dan Pasifik lebih rentan mengalami disrupsi pasokan karena negara-negara di Kawasan ini—misalnya Kamboja atau Viet Nam mengimpor sejumlah besar bahan baku mereka dari pemasok yang terpusat (Gambar 5).<sup>8</sup> Banyak dari negara-negara di sub-kawasan ini sangat bergantung pada Tiongkok untuk pasokan bahan baku, yang menjadikan mereka rentan mengalami kekurangan pasokan bahan baku bila negara pemasok tiba-tiba mengalami penutupan tempat kerja secara mendadak untuk merespon gelombang ke dua, misalnya. Sektor garmen di Asia Timur dan Selatan didorong oleh Tiongkok dan India secara rata-rata lebih rentan mengalami risiko ini karena mereka mendapatkan bahan baku mereka dari dalam negeri.

Sampai 9 September, diperkirakan 30 persen bahan baku dari luar negeri untuk produksi garmen didapat dari negara-negara yang mengalami penutupan pabrik kecuali sektor/tempat kerja esensial setidaknya di beberapa wilayah, yang menyiratkan bahwa pasokan bahan baku ini terganggu (Gambar 6). Ini lebih rendah dari 60 persen yang terlihat pada awal bulan April, namun disrupsi pasokan bahan baku tetap menjadi jalur disrupsi penting terutama di Asia Tenggara dan Pasifik (47 persen) dan Asia Selatan (41 Persen).

7 16 negara atau teritori ini adalah Australia, Brunei Darussalam, Kamboja, (Republik Rakyat) Tiongkok, (Tiongkok) Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Taiwan (Tiongkok), Thailand dan Viet Nam.

8 Lihat catatan kaki sebelumnya dari daftar negara yang dimasukkan ke dalam analisis disrupsi pasokan bahan baku

► **Gambar 4. Hampir setengah dari seluruh pekerjaan pada rantai pasok garmen bergantung pada permintaan dari konsumen yang tinggal di negara-negara dengan kebijakan lockdown yang ketat.**



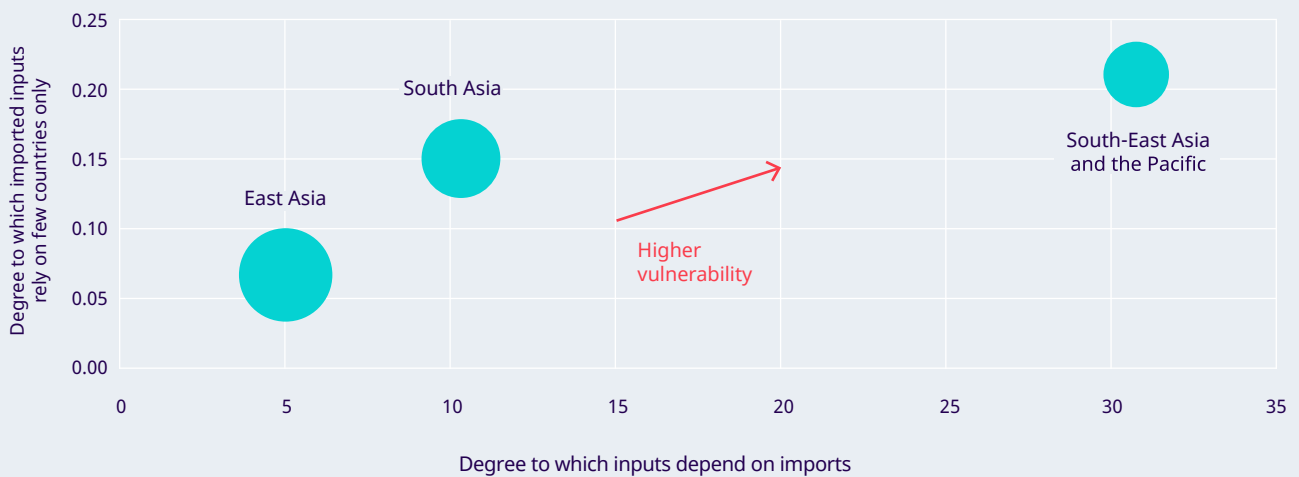
Jobs dependent on garment demand of consumers living in countries with a...

- ...low level of lockdown restrictions
- ...medium level of lockdown restrictions
- ...high level of lockdown restrictions

**Catatan:** Catatan kaki 2 mendata negara-negara yang dimasukkan ke dalam estimasi. Pekerjaan rantai pasok garmen bergantung pada permintaan konsumen untuk produk yang menjadi bagian dari ISIC 13-15. Lihat ILO (2020a) untuk rincian tentang metodologi.

**Sumber:** estimasi ILO berdasarkan Tabel Input-Output Antar Negara OECD dan basis data Oxford COVID-19 Government Response Tracker

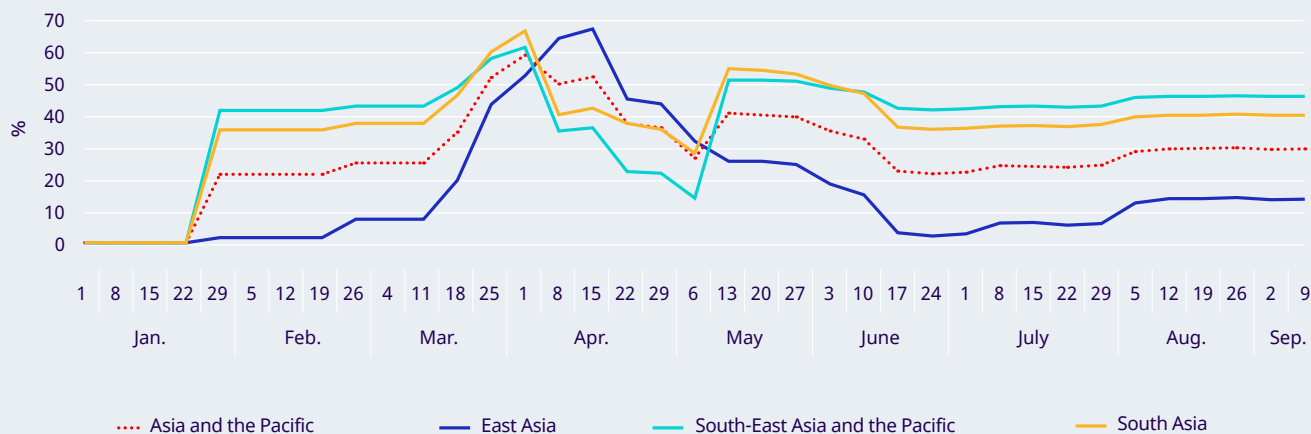
► **Gambar 5. Sektor garmen di Asia Tenggara dan Pasifik yang paling rentan mengalami gangguan pasokan bahan baku**



**Catatan:** besarnya gelembung menunjukkan tenaga kerja sektor garmen total di sub-kawasan. Sumbu horizontal menunjukkan sampai sejauh mana input bergantung pada impor, menunjukkan sampai sejauh mana input dapat didisrupsi oleh penutupan tempat kerja yang dilakukan di negara asing. Diukur oleh proporsi rata-rata bobot ketenagakerjaan dari input impor terhadap total input pada negara-negara yang menerapkan penutupan tempat kerja. Diukur oleh proporsi rata-rata indeks konsentrasi Herfindahl dari input impor dari negara sumber. Catatan kaki 2 mendata negara-negara yang ada dalam estimasi. Sektor garmen termasuk ISIC 13-15. Lihat ILO (2020 a) untuk uraian rinci mengenai metodologi.

**Sumber:** estimasi ILO berdasarkan Tabel Input-Output OECD Antar Negara.

**Gambar 6. Disrupsi pasokan bahan baku di sektor garmen masih tetap tinggi di Asia Timur, Tenggara dan Pasifik**



**Catatan:** angka ini menunjukkan persentase rata-rata bobot tenaga kerja dari pasokan input impor yang diambil dari negara-negara dengan penutupan yang diwajibkan untuk semua kecuali tempat kerja esensial. Perhitungan berdasarkan data untuk 64 negara yang bertanggungjawab untuk 74 persen Angkatan kerja global. Catatan Kaki 2 mendata negara yang ada dalam estimasi. Sektor garmen termasuk ISIC 13-15. Lihat ILO (2020a) untuk uraian rinci mengenai metodologi.

**Sumber:** Estimasi ILO, berdasarkan Tabel Input-Output antar Negara OECD dan basis data Oxford COVID-19 Government Response Tracker

## ► Bagian II: Dampak terhadap perdagangan dan rantai pasok

### Runtuhnya Perdagangan Garmen

Dampak krisis COVID-10 menimbulkan penurunan tajam dalam perdagangan garmen di tingkat global pada paruh pertama 2020. Sebagian besar importasi dari negara-negara pengekspor garmen di Asia menurun tajam, mengakibatkan meluasnya penutupan pabrik—baik sementara dan tanpa batas waktu—dan pemecatan pekerja secara massal.

Impor garmen di Amerika Serikat menurun sebesar 26 persen dari Januari hingga Juni, dibandingkan dengan periode waktu yang sama pada tahun 2019 (Gambar 7). Penurunan yang sama juga terlihat pada data impor Uni Eropa dan Jepang (25 persen dan 17 persen penurunannya). Secara keseluruhan, impor year-on-year (YOY) yang menurun menggambarkan penurunan sebesar US\$ 17,5 miliar dari UE, dan US\$ 17 miliar dari Amerika Serikat, dan US\$ 2,6 miliar dari Jepang dari tahun 2019. Pasar impor ini sangatlah penting untuk negara-negara penghasil garmen, karena Uni Eropa, Amerika Serikat dan Jepang merupakan tiga importir pakaian jadi terbesar pada tahun 2018. Ketiganya berkontribusi pada 61,5 persen impor pakaian jadi pada tahun 2018 (Lu, 2019).

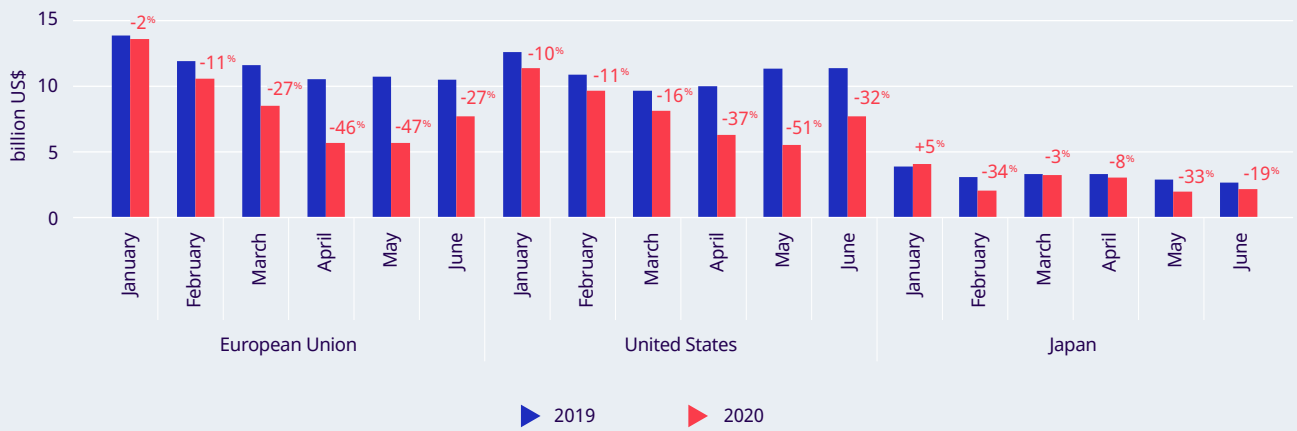
Waktu serta besarnya penurunan impor ini sangat beragam (Gambar 8). Tiongkok mengawali tahun 2020 dengan penurunan sebesar 13 persen dari angka ekspor year-on-

year mereka ke Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat. Namun pada bulan yang sama, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang impor dari Viet Nam, Bangladesh dan Indonesia meningkat. Penurunan proporsi pasar Tiongkok mungkin diambil alih oleh negara-negara ini (Lu, 2020). Namun sejak Februari 2020 impor dari Viet Nam, Indonesia, India dan Bangladesh turun signifikan. Pada Juni 2020, total impor year-to-date dari India dan Bangladesh turun sebesar 41 persen dan 32 persen, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019.

Total impor gabungan ke Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang dari sepuluh negara produsen pakaian jadi dan alas kaki di Asia juga turun secara signifikan antara Januari hingga Juni 2020 bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 (Gambar 9). Pengecualiannya Myanmar dimana peningkatan ekspor ke Amerika Serikat dan Jepang mengimbangi penurunan ekspor ke Uni Eropa.<sup>9</sup> Persentase terbesar penurunan ekspor terlihat di Tiongkok, India, Filipina, dan Sri Lanka. Namun data perbandingan mengenai impor total menunjukkan bahwa penurunan impor garmen turun lebih besar dibandingkan dengan impor pada sektor lain dan jenis barang lainnya. Dengan demikian krisis sangat parah dan semakin terlihat pada perdagangan garmen global dan produsen-produsen besar pada rantai pasok di Kawasan ini.

9 Impor pakaian jadi Amerika Serikat meningkat cukup stabil sejak tahun 2016, sejak Myanmar masuk ke dalam rantai pasok global (GSP) persentasenya terlihat tinggi (contohnya di Gambar 9) karena impor cukup rendah dalam waktu yang lama.

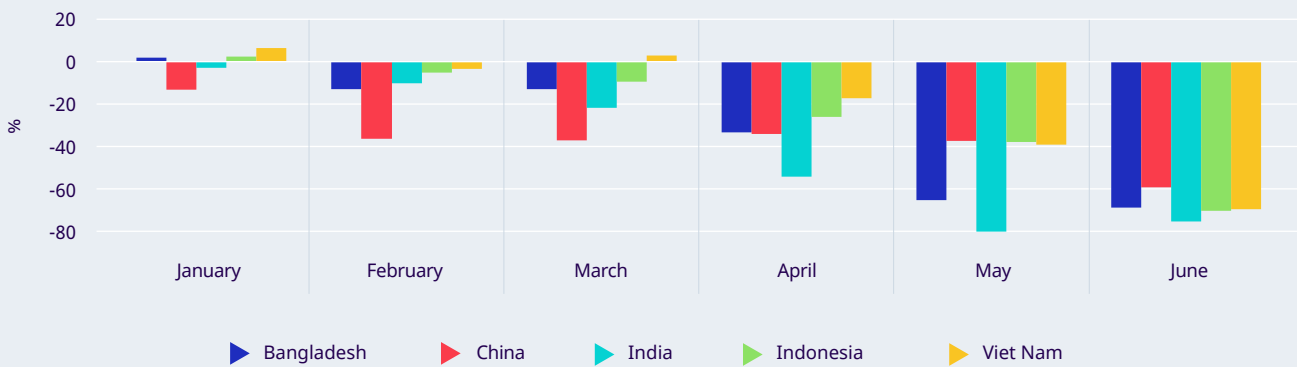
**Gambar 7. Total nilai impor garmen Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat (2019 dan 2020)**



**Catatan:** Impor merujuk pada impor produk dengan kode komoditi HS 42, 43, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65 dan 66

**Sumber:** International Trade Commission, UN Comtrade

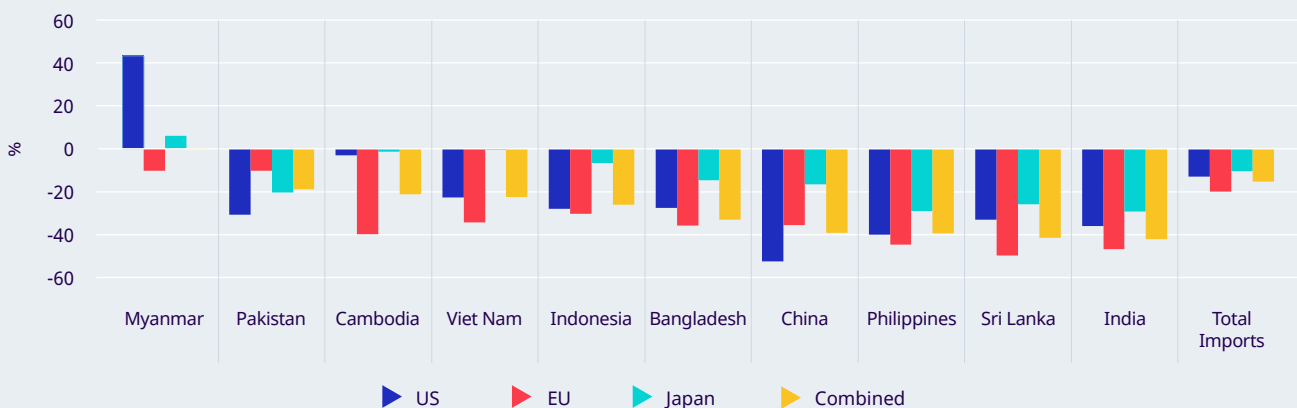
**Gambar 8. Nilai gabungan impor garmen Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat dari beberapa negara, 2020 (perubahan persentase year-on-year 2020)**



**Catatan:** kode komoditi HS 42, 43, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65 dan 66

**Sumber:** UN Comtrade

**Gambar 9. Total nilai impor garment Uni Eropa, Jepang dan Amerika dari negara-negara terpilih, Januari-Juni 2020 (year-on-year percentage change)**



**Catatan:** kode komoditi HS 42, 43, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 65 dan 66

**Sumber:** International Trade Commission, UN Comtrade

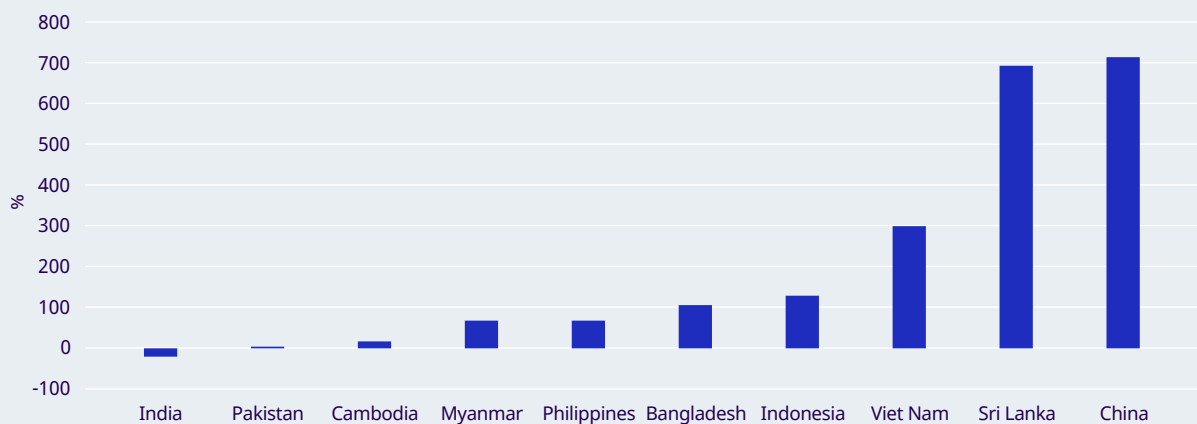
► **Kotak 1. Perdagangan masker meningkat**

Penurunan dramatis pada impor garmen secara keseluruhan dari produsen-produsen Asia, diganti oleh meningkatnya importasi penutup wajah dalam jumlah besar (Harmonized Schedule (HS) code 6307) (Gambar 10). Beberapa pabrik sudah mulai bergeser memproduksi masker agar dapat memenuhi permintaan global. Dari bulan Januari hingga Juni 2020, Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat mengimpor hampir sebesar US\$ 29 miliar bahan tekstil dan masker bedah dari China dan US\$ 999 juta dari Viet Nam.

Uni Eropa, Jepang dan AS mengalami 297 persen peningkatan impor masker dari Viet Nam sejak bulan Januari hingga Juni 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, namun nilai impor ini hanya mewakili 6 persen total nilai ekspor garmen Viet Nam ke pasar-pasar tersebut. Peningkatan ekspor masker tidak menggantikan penurunan pemesanan di sektor garmen sebesar 10 persen dari total produksi (wawancara perwakilan VITAS, 10 Agustus 2020). Demikian pula impor masker dari Sri Lanka meningkat sebesar 687 persen namun hanya sebesar 6 persen dari total nilai ekspor tekstil, pakaian jadi dan alas kaki Sri Lanka pada periode yang sama.

Antara bulan Januari hingga Juni 2020, impor masker dari Tiongkok meningkat sebesar 708 persen dibandingkan tahun 2019 dan mewakili 49 persen total nilai ekspor garmen ke Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat pada periode yang sama. Ini menunjukkan adanya pergeseran besar dari para pemasok untuk memproduksi masker di Tiongkok. Produksi masker yang berkaitan dengan COVID-19 mendukung industry tekstil dan pakaian jadi Tiongkok cukup besar dibandingkan dengan Viet Nam, Sri Lanka dan negara-negara lain.

► **Gambar 10. Impor masker Uni Eropa, Jepang dan Amerika Serikat dari negara-negara terpilih Januari-Juni 2020 (perubahan persentase year-on-year)**



**Catatan:** Data mencakup Januari hingga Juni 2020 dan merujuk pada kode HS 6307

**Sumber:** UN Comtrade and US ITC

## Pembatalan pesanan menjadi satu hal yang umum

Saat krisis mulai muncul, banyak pembeli global yang menanggapi turunnya permintaan konsumen dengan mengurangi atau membatalkan pemesanan, menunda pengiriman dan meminta potongan harga dari para pemasok—seringkali menggunakan klausul kejadian kahar (force majeure) pada kontrak pemasok.<sup>10</sup> Beberapa retailer

besar termasuk Brook Brothers, Debenhams, G-Star (AS), J.Crew, J.C. Penney dan Neiman Marcus menyatakan pailit atau bangkrut (The Fashion Law, 2020). McKinsey memperkirakan pada April 2020 sepertiga dari para pembeli fashion dunia tidak akan bisa sintas dari krisis ini (Amed et al., 2020). Alasan kepaillitan para pembeli ini beragam; analisis mengindikasikan banyak perusahaan yang sudah kepayahan beradaptasi dengan lingkungan retail yang berubah dan beberapa perusahaan retail besar tertimbun utang yang sangat besar sebelum pandemi (Mau, 2020).

10 Klausul kejadian kahar memungkinkan salah satu pihak yang terlibat dalam kontrak untuk membebaskan diri dari kewajiban yang diatur dalam kontrak karena kondisi yang tidak terduga sebelumnya, dalam hal ini pandemic COVID-19.



Data yang menyeluruh mengenai penurunan yang terjadi pada pesanan pakain jadi berdasarkan negara tidak tersedia, namun Survey Better Buying terhadap 179 pemasok dari 30 negara (termasuk Tiongkok, Bangladesh, India dan Pakistan) yang dilakukan pada Mei 2020 menemukan bahwa sebanyak 64 persen pabrik pakaian jadi menerima pembatalan dari pelanggan mereka. Dari mereka yang disurvei, 18 persen mengatakan mereka kehilangan pemasukan karena pembatalan pesanan (Gambar 11). Better Buying juga menemukan bahwa 35 persen pabrik yang disurvei mendapatkan permintaan pemotongan harga terhadap pesanan yang ada sebesar 20 persen (Better Buying Institute, 2020)

► **Gambar 11. Hilangnya nilai karena pembatalan pesanan, total persentase total**



Lebih jauh, survei yang dilakukan pada bulan Mei 2020 di kalangan 250 pabrik yang ikut serta dalam program Better Work ILO di Bangladesh, 38 persen responden pabrik menghadapi penurunan pesanan atau diminta untuk menunda pengiriman, 34 persen mengalami pembatalan

pesanan dan 4 persen tidak dapat memproduksi garmen karena kurangnya bahan baku. Survei yang sama yang dilakukan pada Mei 2020 terhadap 216 pabrik Better Work di Indonesia menemukan bahwa 28 persen mengalami penurunan atau penundaan pesanan, 18 persen mengalami pembatalan pesanan, dan 24 persen mengalami penurunan bahan baku atau bahan yang dibutuhkan untuk produksi. Survei pemasok yang dilakukan oleh Penn State Center for Global Workers' Rights di Bangladesh pada akhir Maret 2020 menemukan bahwa di pabrik-pabrik yang mengalami pembatalan pesanan, 72 persen pembeli tidak membayar bahan baku dan 91 persen belum membayar biaya produksi dari barang-barang yang sudah diproduksi (Anner, 2020).

Terlebih lagi, banyak merk yang dilaporkan bersikukuh untuk termin pembayaran yang lebih lama. Better Buying menemukan bahwa lebih dari 57 persen pemasok menerima permintaan untuk memperpanjang periode pembayaran buyer melampaui standar 45 hari. Sebanyak 39 persen pemasok mengatakan mereka menerima permintaan perpanjangan pembayaran selama 60 hari dan lebih (Better Buying Institute, 2020a). perwakilan Garment Manufacturers Association of Cambodia (GMAC) mengatakan termin pembayaran rata-rata 120 hari pada Juni 2020, beberapa merasa mereka wajib untuk menyepakati termin yang lebih lama lagi 180 hari (Perwakilan GMAC, komunikasi pribadi, 23 Juli 2020).

Beberapa pemasok mengatakan mereka tidak dalam posisi untuk 'menolak' perubahan pada termin kontrak dan polis pembeli. Mereka mengatakan bahwa merk yang menegakkan kejadian kahar bukanlah pilihan, tidak hanya karena saat ini kondisi sedang lamban, tapi juga karena mungkin ini berdampak pada reputasi, hubungan dan keberlanjutan mereka (Nilsson, 2020). Survei pemasok bagi pada pemasok yang dilakukan oleh Sedex—sebuah perangkat audit sosial dan platform data—perusahaan anggota mereka mengatakan bahwa 38 persen responden survei di industry garmen merasakan bahwa pembeli cukup mendukung saat pandemic (Sedex, 2020).

## ► **Bagian III: Runtuhnya Pabrik dan Dampaknya terhadap Kerja**

### **Ribuan pabrik tutup, beberapa sementara waktu, namun banyak yang tidak berjangka waktu**

Konsumsi yang terjun bebas dan turunnya pemesanan dari para buyer memaksa banyak pemasok di Kawasan ini untuk menutup pabrik mereka, baik sementara waktu maupun tidak berjangka waktu. Untuk mencegah penyebaran coronavirus, pemerintah kemudian mengeluarkan perintah

lockdown dengan berbagai jangka waktu dan intensitas pada bulan Maret dan April 2020, mengakibatkan para pemasok harus tutup.

Jumlah persis pabrik yang ditutup sulit untuk dilacak oleh pemerintah, asosiasi industry dan peneliti mengingat dampak pandemic masih sangat berfluktuasi. Di Bangladesh, menurut Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) dari bulan Maret hingga April 2020, 348 pabrik tutup (perwakilan BGMEA, wawancara, 22 Juli

2020). Di Kamboja, diperkirakan 15-25 persen pabrik tidak menerima pesanan di akhir kwartal ke dua 2020, dan lebih dari seperempat perusahaan anggota GMAC tidak membuka lagi pabrik mereka pada bulan Juli 2020 (Perwakilan BGMEA, wawancara, 23 Juli 2020).

Survei yang dilakukan oleh Better Work Bangladesh dan Indonesia antara bulan Maret dan Mei 2020 menunjukkan penyebaran durasi penutupan pabrik karena lockdown COVID-19 atau keterbatasan ekonomi. Di Bangladesh, sekitar 60 persen pemasok tutup selama tiga minggu dengan jumlah pemasok terbesar (sekitar 40 persen) tutup antara 26 hingga 35 hari kerja (Gambar 12). Periode ini sejalan dengan lamanya waktu penutupan tempat kerja non-esensial di Bangladesh, menurut Oxford COVID-19 Government Response Tracker Database.

Sementara itu di Indonesia sekitar 70 persen pabrik Better Work yang ikut serta tutup kurang dari sebulan dengan jumlah terbesar (38 persen) tutup kurang dari 14 hari. Secara keseluruhan di kalangan pemasok dari Indonesia yang disurvei, hilangnya hari kerja mengakibatkan kerugian sebesar US\$ 70 juta dalam bentuk kerugian maupun penundaan bisnis. Perbedaan dalam durasi penutupan pabrik antara Indonesia dan Bangladesh menunjukkan perbedaan kebijakan pemerintah; karena Bangladesh mengeluarkan “libur secara umum” atau lockdown total, sementara Indonesia tidak menerapkan lockdown secara utuh namun hanya menerapkan pembatasan sosial di tingkat provinsi (lihat Lampiran 1).

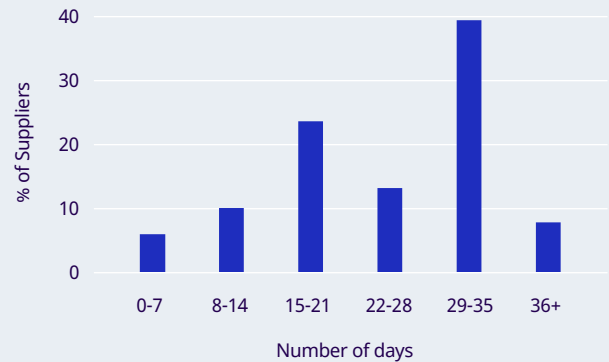
## Pemutusan hubungan kerja meluas

Dampak COVID-19 terhadap pemasok melalui pembatalan pesanan, penurunan permintaan dan lockdown menimbulkan pemecatan dan pemutusan hubungan kerja yang meluas bagi para pekerja. Pemutusan hubungan kerja beragam di setiap negara, bergantung pada perbedaan dampak dan variasi ekonomi dalam Tindakan pemerintah terhadap pemutusan hubungan kerja (lihat Lampiran 1).

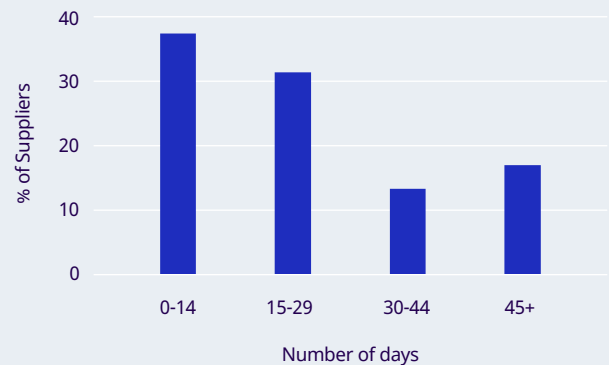
Sebagian besar pemasok di negara-negara yang dicakup dalam laporan ini setidaknya harus memutuskan hubungan kerja dengan Sebagian pekerja mereka. Hampir setengah dari seluruh pemasok yang disurvei memutuskan hubungan kerja dengan setidaknya 10 persen pekerja mereka. Proporsi pemasok dalam jumlah kecil ( 2,1 persen) terpaksa memutuskan hubungan kerja dengan seluruh pekerja mereka (Better Buying Institute, 2020a). Data yang dikumpulkan dari berbagai pabrik di program Better Work Bangladesh menunjukkan bahwa hampir sepertiga dari pabrik yang ikut serta mengatakan mereka harus melakukan pemutusan hubungan kerja pada beberapa pekerja mereka di awal pandemic.

► **Gambar 12. Penutupan Pabrik di Bangladesh dan Indonesia (hari kerja)**

**a. Bangladesh**



**b. Indonesia**



Sumber: Better Work Bangladesh, Better Work Indonesia

Menurut Kementerian Perindustrian Indonesia sebanyak 812.254 pekerja di sektor pakaian jadi dan alas kaki atau sekitar 30 persen dari seluruh pekerja di sektor ini mengalami pemutusan hubungan kerja pada bulan Juli 2020 karena dampak ekonomi akibat pandemi (Kementerian Perindustrian).<sup>11</sup> Survei terhadap 134 pabrik garmen di Indonesia mengungkapkan bahwa respon pabrik yang paling umum adalah untuk mengurangi jumlah staf sementara waktu, memberhentikan staf dengan kontrak sementara, dan memotong gaji/upah. Dari pabrik yang disurvei ini, jumlah jam kerja per minggu juga sudah dikurangi sebesar 15,6 jam per minggunya sejak Maret 2020 (WageIndicator, 2020).

Di Myanmar, laporan-laporan menunjukkan bahwa dari 600 pabrik garmen di negara itu, 44 pabrik tetap tutup yang mengakibatkan sebanyak 22.000 pekerja menganggur (Peoples Dispatch, 2020). Hal serupa juga terjadi di Kamboja, dimana lebih dari 150.000 pekerja—sekitar 15 persen dari pekerja garmen di negara itu—kehilangan pekerjaan mereka saat pandemic (Khmer Times, 2020). Laporan yang dikeluarkan oleh Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) menunjukkan bahwa 80 persen pemasok terpaksa memutus hubungan kerja dengan pekerja mereka pada April dan Mei 2020 dan kemungkinan berlanjut pada Juli

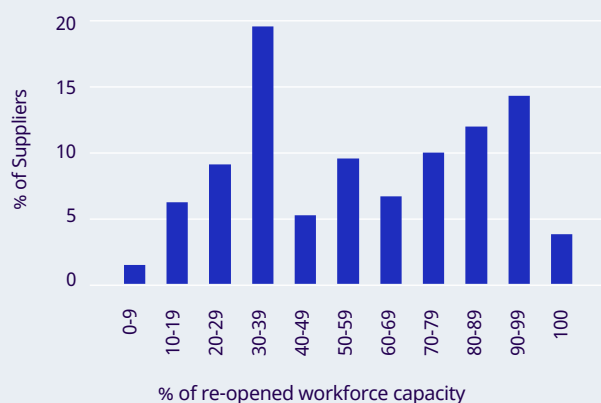
11 Termasuk pemberhentian secara sementara atau permanen, karena survei ini tidak membedakan keduanya.

hingga September (Fibre2Fashion News Desk, 2020a).

## Pabrik beroperasi dalam kapasitas yang semakin berkurang

Operasional pabrik di awal kwartal ke tiga pada tahun 2020—baik yang tetap beroperasi sepanjang tahun ini atau membuka pabriknya Kembali—ternyata tidak beroperasi dalam kapasitas yang sama seperti masa pra-pandemi. Sekitar 43 persen pemasok di Bangladesh beroperasi dengan jumlah pekerja kurang dari 50 persen dari jumlah sebelum pandemic (gambar 13). Hanya 3,9 persen pemasok mempertahankan seluruh pekerja mereka. Proporsi terbesar pemasok (maksimal 20 persen beroperasi dengan jumlah pekerja 30-39 persen sebelum pandemi.

► **Gambar 13. Distribusi penurunan kapasitas pekerja di Bangladesh**



Sumber: Better Work Bangladesh

Sampai bulan Juli, rata-rata proporsi pekerja yang Kembali bekerja setelah pabrik dibuka adalah 57 persen dari total Angkatan kerja di pabrik sebelum pandemi (Tabel 1). Sebanyak 230.749 pekerja dari pabrik-pabrik anggota Better Work Bangladesh belum bekerja meskipun pabrik mereka dibuka kembali, jumlah ini sekitar 41 persen dari jumlah pekerja yang ada pada program Better Work Bangladesh.<sup>12</sup>

► **Tabel 1. Pekerja yang Kembali atau belum Kembali bekerja setelah pabrik dibuka Kembali di Bangladesh**

Kategori	Rata-rata	Median	Min	Max	Total
Proporsi pekerja yang Kembali bekerja setelah dibuka (persen)	57	51	5	100	n/a
Jumlah pekerja yang tidak bekerja	1.109	808	0	8.383	230.749

Sumber: Better Work Bangladesh, 2020.

Karena beberapa pengecer/retailer telah buka Kembali di Uni Eropa dan AS, pesanan-pesanan pun mulai Kembali ke negara-negara produsen garmen, termasuk di Asia dan Pasifik. Bangladesh telah mengalami kembalinya pesanan, terutama dari para pembeli yang meminta para pemasok untuk menjalankan pesanan pra-pandemi. Namun, kondisi di awal sepertinya terdapat perbedaan dalam penyebaran pesanan yang diterima pabrik—dimana pabrik besar dengan mudah mendapatkan pesanan Kembali dibandingkan pabrik berukuran kecil dan menengah. (RMG Bangladesh 2020a).

Laporan dari media di Bangladesh menunjukkan bahwa sebanyak 351 pabrik dengan nilai ekspor gabungan sebesar US\$ 12,26 miliar pada tahun anggaran sebelumnya beroperasi dengan skala penuh tanpa mengalami kehilangan pekerjaan pada bulan Juli 2020. Sementara, sebanyak 341 pabrik skala menengah dengan nilai ekspor sebesar US\$ 4,1 miliar beroperasi dengan 60 persen kapasitas mereka (Mirdha, 2020a).<sup>13</sup>

Berkurangnya kapasitas pabrik juga terlihat di Viet Nam. Industry garmen Viet Nam merupakan salah satu sektor yang terpuak telak di negara tersebut karena pembatalan pesanan. Menurut Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) 70 persen manufaktur garmen mengurangi shift kerja dan merotasi pekerja mereka pada bulan Maret, dan jumlah ini bertambah 10 persen pada bulan April dan Mei (Nguyen & Le, 2020). Pada bulan Juli 2020, VITAS melaporkan bahwa pabrik-pabrik yang dibuka Kembali beroperasi menggunakan 50-60 persen kapasitas mereka dan sekitar 500.000 hingga 600.000 pekerja masih dirumahkan. Asosiasi ini mengestimasi kerugian sebesar US\$ 8,5 – 12 Miliar pada akhir 2020 atau sekitar 22 hingga 31 persen dari ekspor garmen dan tekstil negara tersebut (Perwakilan VITAS, wawancara, 10 Agustus 2020).

Di Sri Lanka, Joint Apparet Association Forum (JAAF) melaporkan bahwa pendapatan pemasok turun sebesar US\$780 juta antara bulan Maret dan Juli 2020, dan kemungkinan ini akan terus turun sebesar US\$ 1 miliar pada akhir 2020—atau 19 persen dari pendapatan tahunan Sri Lanka dari sektor pakaian jadi sebesar US\$ 5,3 miliar. Sebagian besar pabrik telah buka Kembali pada bulan Juli 2020 setelah lockdown yang dilakukan di bulan Maret, meskipun Sebagian besar hanya mengoperasikan 80 persen kapasitas pabrik mereka (perwakilan JAAF, wawancara, 4 Agustus 2020).

Dari asosiasi yang disurvei untuk laporan ini, ada ketidakpastian mengenai keberlanjutan pesanan baru pada kwartal ke tiga tahun 2020 dan selanjutnya karena mereka takut akan adanya “gelombang kedua” COVID-19. JAAF memprediksi pemulihan dengan wujud kurva W, yang menunjukkan peningkatan produksi sementara waktu untuk Kembali ke kondisi pra-pandemi, namun kemudian

12 Data yang tersedia tidak secara khusus menyebutkan mengenai status pekerja atau tunjangan yang diterima pekerja yang tidak Kembali bekerja, atau alasan mengapa mereka tidak Kembali bekerja

13 Menurut data dari UNCTAD, total nilai ekspor garmen Bangladesh adalah US\$ 33,6 Miliar pada tahun 2019.

turun lagi di bulan September dan Oktober 2020. Survei bulan Juli 2020 yang dilakukan oleh Better Buying terhadap 147 pemasok dari 30 negara<sup>14</sup> menunjukkan dinamika yang kurang lebih sama: 92,5 persen responden mengkonfirmasi bahwa para pembeli telah menempatkan pesanan-pesanan baru, namun 59,2 persen mengatakan terjadi penurunan volume pesanan, dan 51 persen mengatakan volume lebih kecil untuk harga yang sama, menunjukkan pendapatan pemasok yang lebih rendah (Better Buying Institute, 2020b).

## Pemotongan upah dan penundaan pembayaran upah menjadi kelaziman

Dengan penurunan pesanan jam kerja dan jumlah pekerja yang signifikan pada industri pakaian jadi di banyak negara antara bulan Maret dan Juni 2020, pendapatan pekerja secara agregat juga mengalami penurunan. Bagi pekerja yang masih bekerja sampai kuartal ke dua 2020 penurunan dalam hal pendapatan dan penundaan pembayaran upah menjadi suatu kelaziman.

Data ILO Better Work Bangladesh menunjukkan bahwa satu dari lima pekerja menerima upah tujuh hari lebih lama dari yang diatur oleh hukum (Tabel 2). Proporsi pekerja yang menerima upah telat meningkat dari satu menjadi tiga pada bulan April 2020.

► **Tabel 2. Penerimaan pembayaran upah 7 hari lebih lama pada bulan berikutnya di Bangladesh**

Bulan	Better Work Bangladesh factories		Better Work Bangladesh workers	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Maret	57	22,8	107.922	18,1
April	80	32,0	165.765	27,8
May*	16	6,4	32.254	5,4

**Catatan:** There are 70 entries on May wage payment that are not updated, which may contribute to the low number of factories paying late. % refers to percentage of all Better Work Bangladesh factories.

**Sumber:** Better Work Bangladesh.

Dan lebih jauh lagi sebanyak 1.377 pekerja sektor pakaian jadi di Bangladesh pada survei telepon yang dilakukan oleh Microfinance Opportunities (MFO) dan South Asia Network on Economic Modeling (SANEM). Survei ini menemukan bahwa pekerja melaporkan median gaji yang lebih rendah sebesar Tk 5.522 (US\$ 65) pada bulan Mei dibandingkan Tk 9,500 (US\$ 113) pada bulan April (Garment Worker Diaries,

2020). Gaji yang lebih rendah memengaruhi pekerja secara signifikan, terutama dengan ketahanan pangan. Survei MFO SANEM menemukan bahwa 77 persen responden pada Juni 2020 mengatakan bahwa makanan yang mereka konsumsi berkurang karena mereka tidak punya cukup uang untuk makanan. Proporsi ini turun dari 85 persen responden pada bulan Mei 2020. Survei lain oleh BRAC di Bangladesh terhadap 1.200 pekerja garmen menemukan bahwa hanya 50 persen pekerja menerima gaji utuh untuk bulan Maret 2020, 42 persen menerima gaji utuh pada bulan April dan 74 persen pekerja menerima gaji utuhnya pada Mei 2020 (ILO BRAC, 2020).<sup>15</sup>

Bagi para pekerja sektor pakaian jadi bergantung pada program bantuan pemerintah, pendapatan yang mereka terima jauh lebih rendah daripada pendapatan biasa dan bahkan di bawah upah minimum, menjadikan sulit bagi pekerja untuk menafkahi diri mereka dan keluarga mereka (lihat Lampiran 1 untuk uraian aksi pemerintah per negara).

Analisis yang dilakukan oleh Clean Clothes Campaign mengenai kesenjangan upah di Bangladesh, Kamboja, India, Indonesia, Myanmar, Pakistan dan Sri Lanka memperkirakan bahwa pekerja di sektor garmen mengalami kerugian antara US\$ 3,19 hingga 5,78 miliar pada Maret hingga Mei 2020 karena pemutusan hubungan kerja dan penutupan pabrik (Clean Clothes Campaign, 2020).

Misalnya, Business and Human Rights Resource Center melaporkan bahwa pekerja garmen di India mengalami penurunan 57 persen upah mereka (BHRRC, 2020). Selain itu, Care International juga menyimpulkan bahwa meskipun pemerintah Kamboja bekerja sama dengan pemberi kerja untuk menyediakan tunjangan US\$70 bagi pekerja yang dirumahkan, hanya 41 persen pekerja yang disurvei pada bulan Mei menerima tunjangan penuh (CARE, 2020). Survei dari ILO Better Factories Cambodia (BFC, Better Work) terhadap 375 pekerja pada bulan Mei dan Juni 2020 menyimpulkan bahwa 49 persen mengalami penurunan pendapatan karena gangguan produksi yang disebabkan oleh COVID-19, dan 41 persen mengatakan mereka mengalami penurunan jam kerja (Better Factories Cambodia, 2020).

Para pekerja yang tidak menerima upah atau menerima upah yang lebih rendah menjadi sumber kekhawatiran para penegak hukum setempat karena kemungkinan menimbulkan kekacauan. Di Bangladesh, Polisi Industrial menegeluarkan laporan pada akhir Juli 2020 yang menunjukkan 177 pabrik berisiko mengalami kekacauan karena kegagalan mereka membayarkan upah dan tunjangan hari raya, dan permasalahan cuti pekerja. Menurut Polisi Industrial, 756 pabrik pakaian jadi belum membayar gaji bulan Juni kepada pegawai mereka (RMG Bangladesh, 2020b). pada akhir Agustus 2020, Bangladesh Institute of Labour Studies (BILS) menyatakan bahwa “hampir tidak ada keresahan dari para pekerja karena pembayaran dan pemecatan [di sektor garmen]” (Mirdha, 2020b).

14 Termasuk diantaranya Tiongkok, Hong Kong (Tiongkok) India, Bangladesh, Amerika Serikat, Pakistan.

15 Lihat ILO (2016) dan ILO (2018) untuk data dan informasi lebih lanjut mengenai upah pada sektor garmen di Kawasan Asia dan pasifik.

## Perempuan terdampak secara disproporsional

Dampak kesehatan dan ekonomi dari pandemi COVID-19 juga memengaruhi perempuan pekerja secara disproporsional, menimbulkan risiko serius membalikkan pencapaian menuju kesenjangan gender. Di Asia dan Pasifik, industri garmen mempekerjakan lebih dari 5 persen dari semua pekerja perempuan, menjadikan industri ini menjadi industri yang mempekerjakan banyak perempuan di kalangan sektor industri di Kawasan (ILO, 2020d). Jumlah pekerja perempuan di sektor garment di banyak negara Asia cukup besar proporsinya (Lihat Gambar 2)

Disrupsi pada rantai pasok garmen tidak hanya secara signifikan memengaruhi para pekerja perempuan, pandemic juga semakin memperburuk kondisi ketimpangan yang sudah ada sebelumnya. Banyak pekerja, terutama perempuan, mengalami beban ganda karena harus menggabungkan tanggungjawab kerja berbayar dan tidak berbayar, menanggung beban tanggungjawab rumah tangga dan perawatan anak-anak dan anggota keluarga lainnya secara disproporsional. Pada survei Care International terhadap 307 orang perempuan pekerja sektor garmen di Kamboja yang dilakukan pada bulan Mei dan Juni 2020, 36 persen responden mengatakan bahwa mereka menanggung beban kerja yang lebih berat daripada laki-laki saat masa pandemic, dan 13 persen mengatakan mengalami peningkatan pekerjaan perawatan tak berbayar menjadi tiga masalah teratas dari krisis (CARE, 2020).

Perempuan tetap menerima upah yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Survei MFO SANEM di Bangladesh menemukan bahwa pada bulan Juni, perempuan menerima gaji median sebesar Tk 9,200 (US\$ 109) dibandingkan Tk 10,000 (US\$ 118) untuk laki-laki pada posisi yang sama. Perempuan pekerja juga mengatakan mereka mengkonsumsi makanan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. 79 persen perempuan mengatakan mereka mengkonsumsi sedikit makanan dibandingkan 70 persen laki-laki (Garment Worker Diaries, 2020).

Meskipun beberapa pabrik sudah dibuka kembali, fasilitas penitipan anak masih tutup, menjadikan orangtua yang bekerja—dan perempuan bekerja, mengalami kesulitan. Ketersediaan tempat penitipan anak di pabrik merupakan persyaratan yang diatur oleh undang-undang nasional di beberapa negara. Misalnya, menurut undang-undang di India, pabrik dengan lebih dari 30 orang pekerja perempuan harus menyediakan fasilitas penitipan anak; pabrik mengatakan penutupan penitipan anak sebagai langkah untuk membatasi penyebaran virus (Nagarj, 2020). Di negara lain seperti Kamboja dan Bangladesh dampak pandemi terhadap keluarga dan pekerja semakin menyoroti kegagalan pemerintah dalam menegakkan kepatuhan terhadap persyaratan perawatan anak yang diatur dalam undang-undang (New Age, 2019), dan perlunya mendukung layanan perawatan yang terjangkau, profesional dan

mudah diakses oleh semua pekerja.

Terdapat beberapa tuduhan—baik yang muncul sebelum atau saat krisis COVID-19—mengenai pemecatan yang dilakukan pemberi kerja terhadap pekerja yang hamil serta kegagalan mereka membayar tunjangan maternitas. Sejak Mei 2020, Sommito Garments Sramik Federation telah mengajukan 50 tuntutan atas nama para pekerja hamil yang dipecat di Bangladesh (Politzer, 2020). BGMEA menampilkan tuduhan-tuduhan tersebut, mempertanyakan keabsahan laporan media, dan menyampaikan keinginan mereka melakukan investigasi pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang hamil (BGMEA, 2020).

Pandemi juga meningkatkan risiko kekerasan dan pelecehan berbasis gender (ILO, 2020e, 2020f). Sejak wabah COVID-19, kekerasan terhadap perempuan, terutama KDRT, meningkat (UN Women, 2020). Langkah-langkah lockdown dan kesulitan ekonomi berkontribusi pada peningkatan angka kekerasan dalam rumah tangga dan membatasi akses pekerja pada layanan yang sudah terbatas. CARE International menemukan bahwa di kalangan perempuan pekerja sektor garmen di Kamboja, 33 persen mengatakan bahwa COVID-19 semakin meningkatkan ketegangan dan konflik di rumah mereka. CARE International mencatat bahwa kekerasan berbasis gender seringkali tak dilaporkan, dan hasil temuan survei mereka menunjukkan bahwa 2 persen dari pekerja perempuan mengatakan kekerasan dalam rumah tangga sebagai permasalahan yang masih sering disepelekan (CARE, 2020)

## Kebutuhan akan Kesehatan dan Keselamatan harus menjadi Prioritas utama

Di seluruh negara yang disurvei, pemerintah dan asosiasi industri telah mengeluarkan panduan untuk mengurangi penyebaran COVID-19 (lihat Lampiran 1). Survei Better Factories Cambodia terhadap para pekerja digunakan untuk menguji jangkauan pesan mengenai pandemic serta hubungannya dengan kerja mereka di Kamboja. Terdapat kesadaran yang tinggi mengenai COVID-19 dan lebih dari 70 persen pekerja mengingat mereka menerima informasi terbaru dari pemberi kerja di tempat kerja melalui pengumuman yang disampaikan melalui pelantang suara. Dua per tiga menerima informasi terkini dari pemberi kerja melalui poster atau cara-cara tertulis atau komunikasi visual lainnya (Better Factories Cambodia, 2020).

Asosiasi pengusaha mengambil beberapa langkah untuk mempromosikan panduan keselamatan COVID-19 pada pabrik-pabrik anggota. Di Viet Nam, VITAS dan Ministry of Labour and Social Affairs (MOLISA) bekerjasama dengan ILO Better Work membagikan panduan mengenai aturan-aturan K3 (Perwakilan VITAS, wawancara, 10 Agustus 2020). Di Sri Lanka, JAAF mengatakan bahwa mereka mengukur suhu tubuh pekerja di titik-titik transportasi kerja, mesin jahit juga diatur dengan jarak yang lebih jauh, serta pengaturan

tempat duduk di kantin dibuat bertahap (perwakilan JAAF, wawancara, Agustus 4, 2020).

Masih belum jelas bagaimana mekanisme penegakan untuk semua aturan-aturan ini, dan sejauh mana pabrik melaksanakannya. Meskipun banyak pabrik telah menerima panduan dan mengatakan mereka mengambil langkah untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19, terdapat bukti bahwa pemberi kerja kurang konsisten dalam menjalankan langkah-langkah K3, terutama yang berkaitan dengan jaga jarak secara sosial.

Hasil dari survei telepon yang dilakukan Better Factories Cambodia (BFC) ILO yang dirancang untuk memahami pandangan pekerja mengenai implementasi langkah-langkah K3 yang berkaitan dengan COVID-19 menyiratkan bahwa pemeriksaan suhu tubuh yang diwajibkan mereka masuk ke pabrik dan masker selalu tersedia seperti yang disebutkan oleh 80 persen pekerja. Namun hanya 20 persen pekerja mengatakan pemberi kerja menjalankan langkah-langkah pembatasan sosial dengan mengurangi kerumunan di kantin atau di area rehat. Hanya 14 persen pekerja melaporkan bahwa pemberi kerja melakukan disinfeksi permukaan area kerja, dan 12 persen melaporkan bahwa pemberi kerja telah melakukan rekonfigurasi area produksi untuk memastikan pekerja menjaga jarak. Sebagai konsekuensinya, satu dari dua pekerja menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menjaga jarak dengan baik di tempat kerja dan saat menglaju (Better Factories Cambodia, 2020).

Hampir setengah pekerja yang disurvei oleh BRAC di Bangladesh mengatakan bahwa pabrik mereka tidak menyediakan alat pelindung diri. Sekitar satu dari empat pekerja yang disurvei mengatakan mereka tidak mendapatkan informasi mengenai cuti sakit berbayar atau aturan mengenai cuti yang khusus bila mereka mengalami gejala-gejala COVID-19 (ILO BRAC, 2020).

Di Bangladesh, terdapat beberapa laporan mengenai beberapa pabrik buka saat lockdown tanpa adanya perlindungan untuk menjaga jarak secara sosial (Islam, 2020). Di India, terdapat laporan yang menunjukkan bahwa pekerja yang tidak Kembali ke kampung halaman mereka, "diminta untuk tinggal, bahkan mungkin di'sekap' di dalam asrama milik perusahaan dan [...] terpapar infeksi. Ekspertir khawatir bahwa bila pekerja ini keluar mungkin mereka akan menghadapi kekurangan pekerja yang sangat akut ketika pekerjaan Kembali normal." (SLD, 2020). Di Kamboja, pekerja dan para advokat pekerja menyampaikan kekhawatiran mengenai risiko terpapar COVID-19 di truk yang padat yang biasanya digunakan sebagai alat angkutan pekerja ke dan dari pabrik (Moniroth 2020)

## Kebebasan berserikat sebagai hak pekerja yang mendasar

Keanggotaan serikat pekerja secara umum cenderung lebih rendah di Kawasan ini (Sebagian disebabkan oleh informalisasi yang sangat tinggi di banyak negara tersebut), menurut data terkini yang tersedia, yang menunjukkan angka keanggotaan pada serikat sebesar 1 persen di Myanmar, 7 persen di Indonesia, 10 persen di Kamboja, dan 15 persen di Sri Lanka.<sup>16</sup> Sektor garmen di Asia juga ditandai dengan rendahnya tingkat perundingan bersama di tingkat pabrik dan sectoral.

Pembatasan kebebasan berserikat sudah terjadi bahkan sebelum pandemi di Sebagian besar negara yang disurvei di dalam laporan ini. Terlihat pada laporan ILO's Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (CEACR) – mekanisme pengawasan imparial yang dibentuk untuk mengevaluasi penerapan standar perburuhan internasional yang dilakukan oleh negara-negara anggota ILO.<sup>17</sup> Misalnya, pada tahun 2020, Komite ini meminta pemerintah Bangladesh, Kamboja, Tiongkok, Filipina, Sri Lanka untuk memberikan komentar mengenai observasi dan/atau tuduhan yang diajukan oleh ITUC menyangkut kebebasan berserikat, perundingan bersama dan hubungan industrial (ILO, 2020g).

Laporan yang dikeluarkan oleh Business and Human Rights Resource Centre mengidentifikasi Sembilan kasus pemecatan anggota serikat atau pemimpin serikat di Myanmar, Kamboja, India dan Bangladesh (Khambay & Narayanasamy, 2020). Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Oxfam bulan September 2020 mencatat bahwa sebanyak 1.200 pekerja di India diberhentikan oleh pemasok besar saat terjadi tuduhan intimidasi pekerja dan pemberangusan serikat (Oxfam, 2020). Meskipun Kerangka Perjanjian Global<sup>18</sup> telah cukup membantu dalam menangani perselisihan dengan memfasilitasi dialog di kalangan serikat, manufaktur dan brands, resolusi seperti ini akan cukup lama mengingat perlunya berkomunikasi dengan para pemasok yang memiliki kantor pusat di luar negara-negara tempat mereka memproduksi, dan dukungan brand yang berubah-ubah pada setiap pabrik (perwakilan INdustriALL, wawancara, 14 Agustus 2020) Di Myanmar meskipun laporan media menyoroti pembubaran serikat saat pandemic telah menimbulkan intervensi brand dan pengembalian mereka ke tempat kerja (Paton, 2020), aktivis serikat buruh mengatakan bahwa strategi ini kurang efektif terutama untuk kasus sub-kontraktor dan brand yang kurang terkenal (Maung, 2020).

Pola pembatasan kegiatan serikat dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius di Kamboja sejak 2016 mengakibatkan keputusan penting Uni Eropa untuk menarik beberapa

16 Data tersedia di ILOSTAT

17 Bangladesh, India, Indonesia, Filipina, Tiongkok dan Viet Nam semua menerima peringkat "5", menunjukkan tidak ada jaminan terhadap kebebasan berserikat, menurut International Trade Union Confederation (ITUC) Global Rights Index pada tahun 2019. Tiga negara—Sri Lanka, Pakistan, dan Myanmar—mendapatkan peringkat "4" dari ITUC dengan pelanggaran hak yang sistematis (ITUC, 2020).

18 Kerangka Perjanjian Global (GFA) merujuk pada perjanjian global yang dirundingkan antara serikat pekerja dan perusahaan multinasional yang mengatur mengenai standar perburuhan, kesehatan atau lingkungan pada rantai pasok perusahaan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan klik: <http://www.industrialunion.org/what-is-a-global-framework-agreement>

akses bebas pajak mereka ke pasar Uni Eropa (Komisi Eropa, 2020). Cambodian Alliance of Trade Unions (CATU) melaporkan bahwa empat anggota dipecat karena dituduh “memprovokasi pekerja melakukan tindak pidana” (SOvuthy 2020). Undang-undang kedaruratan yang dikeluarkan pada 29 April 2020 “memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menyatakan kondisi darurat kapanpun Kamboja menghadapi ‘bahaya’ dan risiko yang besar”. (Peytermann & Hughes, 2020).

Di Bangladesh, media setempat melaporkan bahwa pemerintah mengeluarkan instruksi meningkatkan

surveilans terhadap LSM dan serikat (Hasnayeem, 2020), serta menuduh beberapa organisasi internasional menyulut kerusuhan di sektor itu.

Aturan mengenai lockdown juga membatasi kegiatan serikat dan pengorganisasian. Di Bangladesh, undang-undang ketenagakerjaan mewajibkan dua pertemuan anggota sebelum serikat dapat didaftarkan. Mengingat lockdown, saat ini belumlah dimungkinkan untuk menyelenggarakan pertemuan-pertemuan yang wajib, dan ini mengakibatkan menurunnya tingkat registrasi serikat (perwakilan IndustriALL, wawancara, Agustus 14, 2020)

## ► Bagian IV: Respons Kebijakan di Asia dan Pasifik

### Pemerintah di Kawasan ini merespon krisis secara proaktif

Respons kebijakan pemerintah terhadap krisis COVID-19 mengikuti sebuah pola.<sup>19</sup> Tabel A1 pada Lampiran 1 merangkum kebijakan tempat kerja dan fiskal yang diterapkan pada paruh pertama 2020 pada lima kategori besar: penutupan industry, bantuan pendapatan bagi pekerja, perlindungan ketenagakerjaan, cuti pekerja dan subsidi industry. Sebagian besar kebijakan yang ada di table dirancang untuk dapat diterapkan di seluruh sektor manufaktur kecuali di Bangladesh, Kamboja, Myanmar dan Sri Lanka dimana kebijakan ditujukan secara spesifik untuk industry pakaian jadi dan alas kaki (karena besarnya pengaruhnya terhadap perekonomian dalam negeri).

Tabel A1 pada Lampiran 1 belum komprehensif dan fokus pada langkah-langkah yang dilakukan untuk membantu memitigasi krisis. Tabel ini juga tidak mengurai secara rinci mengenai hukum dan praktik ketenagakerjaan yang ada sampai saat ini kecuali kebijakan cuti sakit yang masih tetap tak berubah namun tetap relevan. Table ini menunjukkan bahwa beberapa pemerintah melakukan upaya untuk mendukung pekerja dan pemasok sektor garmen. Namun, mengingat besarnya krisis yang tak terduga, masih perlu waktu dan terlalu dini untuk mengevaluasi apakah langkah-langkah yang dilakukan cukup untuk menjaga bisnis dan mata pencaharian, termasuk perempuan pekerja yang bekerja di sektor garmen.

Solidaritas dan dukungan internasional akan menjadi hal penting untuk negara-negara di Kawasan Asia dan Pasifik, termasuk yang memiliki ruang fiskal terbatas. Paket stimulus pada perekonomian yang maju lebih besar daripada di perekonomian berkembang dan sampai Juni 2020 jumlahnya

88 persen dari stimulus fiskal global (ILO, 2020h). Namun, dukungan bagi para pekerja dan pabrik di negara-negara berkembang, termasuk manufaktur garmen mendominasi ekonomi harus menjadi prioritas yang penting.

Dalam hal dukungan, banyak industry dan pemerintah yang menerima pinjaman dan hibah—terbanyak—dari Lembaga-lembaga multilateral termasuk Bank Dunia dan Uni Eropa, International Monetary Fund dan Asian Development Bank. Sebesar €9 miliar (sekitar US\$ 10.6 miliar) dikomitmenkan pada April 2020 untuk mendukung perawatan kesehatan dan langkah-langkah perlindungan sosial termasuk subsidi upah yang disebutkan oleh pemerintah di engara-negara berpendapatan rendah dan menengah rendah (Borrel, 2020). Termasuk €263 juta untuk Bangladesh (atau \$ 308 juta) khususnya untuk bantuan tunai dan perlindungan sosial pada industry berorientasi ekspor dan Kamboja (€487 juta, atau US\$571 juta) — baik untuk sumber pakaian jadi brand berbasis Uni Eropa (EEAS, 2020b; Xinhua, 2020). Department for International Development (DfID) Inggris mengumumkan program bantuan pada bulan Agustus sebesar £6.85 juta, Sebagian dikhususkan untuk “meningkatkan layanan kesehatan bagi 80.000 pekerja pabrik di Bangladesh” (Beaumont, 2020).

Di Myanmar, dimana 70 persen garmen diekspor ke negara-negara anggota Uni Eropa, proyek SMART Textile & Garments yang didanai oleh Uni Eropa melakukan pembayaran langsung dari MMK 35.000 hingga MMK 125.000 per bulan (US\$ 26 hingga US\$92) kepada pekerja sektor pakaian jadi yang dirumahkan dan diberhentikan dari pekerjaannya antara bulan April dan Desember 2020. Uni Eropa menggunakan dasar “Dari 700.000 pekerja di industry pakaian jadi, diperkirakan 350.000 berisiko dirumahkan tanpa mendapatkan upah atau bahkan kehilangan

<sup>19</sup> Pengalaman industry ini pada krisis finansial 2008 dan penurunan yang dialami perdagangan pakaian jadi sangat instruktif bagi pemerintah, mitra sosial dan peneliti yang berupaya memikirkan response terhadap krisis COVID-19 dalam dua acara. Pertama, respons pemerintah yang dikembangkan pada 2008 dan 2009 untuk membatasi kerugian di tingkat industry dan ekonomi makro—merupakan elaborasi kebijakan yang dirancang untuk menghalau dampak negative pada akhir Perjanjian Multi Serat pada tahun 2005—telah didaurulang dan diperluas untuk era COVID-19. Dua, kurangnya data yang dapat diandalkan dan pelaporan aksi kebijakan menjadikan sulit untuk mengukur dampak jangka pendeknya, yang merupakan hal yang sangat jamak terjadi pada para pelaku dan pengamat industry yang terlibat dalam response krisis finansial 2008-09 (Forstater, 2010).

pekerjaan mereka permanen,” dalam estimasi mereka ketika menghimpun €5 juta pada bulan Maret 2020. Dana ini dirancang untuk memberikan “bantuan tunai yang cepat dan tidak birokratis” selama satu hingga tiga bulan hingga bagi 80.000 pekerja. Dana ini melakukan pembayaran senilai €2.5 juta kepada 45,061 pekerja dari 1 Mei hingga 3 Agustus 2020 (Fibre2Fashion News Desk, 2020b).<sup>20</sup>

Serikat pekerja juga mempertanyakan mengenai cakupan dan implementasi kebijakan-kebijakan ini (Salaverria & Gascon, 2020). Seperti yang terlihat pada bab di atas, pembayaran yang terlambat atau tidak memadai kepada para pekerja sektor pakaian jadi—baik yang masih bekerja dan yang dirumahkan atau menganggur—berujung pada protes di Bangladesh, Kamboja, Indonesia dan Filipina. Ketegangan ini semakin diperburuk dengan keputusan untuk menunda proses penentuan upah minimum yang dijadwalkan pada tahun 2020 di Myanmar dan Kamboja (Khmer Times, 2020; Wathan, 2020).

Serikat pekerja juga fokus pada pentingnya memiliki persyaratan yang lebih jelas untuk melindungi para pekerja produksi dari penyebaran penyakit yang berkaitan dengan COVID-19. Contohnya di Sri Lanka, Ceylon Federation of Labour pada April 2020 mendorong “otoritas untuk menentang aksi apapun yang memulai Kembali produksi tanpa memastikan keselamatan dan keamanan pekerja saat bekerja, dalam hal ketenagakerjaan dan ketika melaju dari dan ke tempat kerja” (Times Online, 2020). Seperti panduan yang dikeluarkan di seluruh negara yang ada dalam laporan ini, seruan untuk perlindungan pekerja sangat luas. Perintah dan panduan yang tidak mengikat mengenai lockdown dan langkah-langkah kesehatan yang khusus untuk pabrik mulai dari mencuci tangan hingga perbaikan pemurnian udara dan perubahan dalam hal Panjang dan lamanya shift (Fakhri, 2020; DFDL, 2020b). panduan ini berlawanan dengan perintah lockdown yang dikeluarkan untuk kegiatan lain dalam ruangan tertutup termasuk di bioskop atau universitas (EconomyNext, 2020).

Kebijakan dan pelaksanaan dari dua isu ini—langkah kesehatan yang efektif dan melengkapi keberlanjutan pemberi kerja dan pendapat pekerja—penting bagi pekerja, pemberi kerja dan pemerintah berharap merangkak Kembali ke kesehatan ekonomi makro pada jangka pendek. Juga merupakan langkah penting untuk kesehatan jangka Panjang industry dan pekerja ini (ILO, 2020i).

## Dialog Sosial penting untuk mencari solusi

Dialog sosial membentuk response terhadap krisis yang produktif di negara-negara dimana ada dialog struktur atau inisiatif. Di Sri Lanka, pemerintah membentuk satuan tugas tripartite, yang menyepakati membayar gaji pekerja pada bulan Maret hingga Juni sebesar 50 persen dari gaji pokok (IndustriALL, 2020a). di Myanmar, protocol Kebebasan berserikat ditandatangani pada bulan November 2019 yang dirundingkan antara brand anggota ACT dan Industrial Workers’ Federation of Myanmar (IWFM) yang berafiliasi dengan industriALL terbukti berguna untuk mempekerjakan anggota IWFM yang dipecat di dua pabrik.<sup>21</sup> Dialog antara serikat dan brand pakaian jadi global berkontribusi pada perjanjian yang cukup cepa tantara afiliasi INdustriALL dan pemberi kerja (INdustriALL, 2020b).

Di Bangladesh—dibangun dari struktur ACT yang ada—BGMEA dan IndustriALL Bangladesh Council menyepakati nota kesepahaman pada Mei 2020, dirancang untuk menghindari pemutusan hubungan kerja dan membayar gaji pekerja untuk bulan April 2020. Yang menarik, perwakilan INdustriALL dan BGMA mencatat bersatunya kepentingan manufaktur dan serikat, didorong oleh keberatan bersama akan pembatalan pesanan yang sudah selesai dibuat dan dalam proses pembuatan oleh para brand (Fair Fashion Think Tank, 2020; perwakilan INdustriALL, wawancara 14 Agustus, 2020).

Di negara lain, dialog sosial tingkat nasional mengenai respons COVID-19 lebih cocok dipandang sebagai konsultasi dan bukan negosiasi, dan mendorong pada deklarasi kerjasama yang lebih luas. Program Better Work Indonesia ILO baru-baru ini memfasilitasi dialog antara serika pekerja sektor garmen dan alas kaki—APINDO, API, dan APRISINDO—yang menghasilkan komitmen bersama untuk mendorong pemulihan sektor garmen dan alas kaki Indonesia (ILO, 2020j). Komitmen yang mendorong kepatuhan dengan panduan keselamatan dan kesehatan kerja dan dialog sosial dalam menangani perselisihan (ILO, 2020k). Di Pakistan, Pakistan Workers Federation (PWF) dan Employers Federation of Pakistan (EFP) mengeluarkan deklarasi bersama yang menyatakan niat mereka untuk bekerja sama (ILO, 2020l).

Di Kamboja, Myanmar dan Viet Nam, proses penentuan upah minimum sectoral tertunda atau justru menimbulkan perpecahan para pemangku kepentingan. Di Myanmar, diskusi mengenai upah minimum tertunda hingga setidaknya September 2020 (Wathan, 2020). Di Kamboja, dengan keberatan dari serikat, GMAC meminta Ministry of Labour and Vocational Training (MOLVT) menunda penentuan upah minimum yang telah dijadwalkan sampai 2021 (Reaksmey, 2020). MOLVT berniat melakukan studi

20 Para mitra proyek termasuk Amfori, Centre for Economic & Social Development (CESD) dan Confederation of Trade Unions Myanmar (CTUM), H&M, C&A, dan Bestseller. Wave-wing—sistem perbankan berbasis telepon genggam yang relative efisien dan murah—digunakan untuk melakukan pembayaran bantuan darurat bagi para pekerja pakaian jadi di Myanmar dan Kamboja.

21 ACT-atau Action, Collaboration, Transformation—merupakan sebuah kesepakatan global antara brand fashion dan pengecer dan serikat pekerja bertujuan untuk memajukan gaji pekerja melalui perundingan bersama di tingkat industry dan reformasi praktik pembelian.



mengenai dampak COVID-19 terhadap pekerja di sektor garmen sebelum diskusi upah tahunan (Chheng, 2020). Sementara di Viet Nam, pada bulan Agustus 2020 National Wage Council memutuskan untuk tidak menaikkan upah minimum regional pada tahun 2021 dan menunda upah minimum regional mereka pada tingkatan 2020. VGCL menolak untuk berpartisipasi pada pengambilan suara yang menyatakan bahwa hal ini tidak terlalu dibahas dengan baik. Serikat mengusulkan penundaan dalam negosiasi sampai informasi mengenai pandemic tersedia namun usulan ini ditolak (Nguoi Lao Dong, 2020).

## Respons Industri bersama Terhadap COVID-19

Pada bulan-bulan awal krisis COVID-19, serikat dan para advokat perburuhan di Asia dan di seluruh dunia bereaksi terhadap pembatalan kontrak produksi pakaian jadi oleh brand dengan permintaan bahwa para buyer menghargai kontrak yang ada, membayar pesanan yang sedang dalam proses dan membantu modal pemasok dan pendapatan para pekerja (IndustriaALL, 2020c). Seperti yang disebutkan di atas, kampanye publik #PayUp mendorong berbagai brand besar untuk menghargai kontrak dan berdiskusi mengenai permintaan akan keberlanjutan dan kerja layak—serta standar komersial utama—pada perdagangan pakaian jadi global.<sup>22</sup>

ILO telah membantu untuk menjadi perantara COVID-19: Action in the Global Garment Industry sebagai upaya untuk membantu mendorong niat internasional dan sumberdaya untuk memberikan dukungan kesehatan dan ekonomi kepada negara-negara pengekspor garmen di tingkat global. Call to Action dirundingkan pada April 2020 antara International Organisation of Employers (IOE), International Trade union Confederation (ITUC) dan IndustriaALL Global Union.

Lebih dari 125 pihak yang menandatangani Call to Action ini

dan Kelompok Kerja tripartite plus, yang diselenggarakan oleh ILO dan dikoordinasikan oleh OIE dan ITUC bertujuan untuk menjadi “katalis aksi dari seluruh industry garmen global untuk mendukung manufaktur sehingga dapat menyintas dari disrupsi ekonomi yang disebabkan oleh pandemic COVID-19 dan melindungi pendapatan pekerja garmen, kesehatan dan ketenagakerjaan”.<sup>23</sup> Tujuan jangka Panjang adalah untuk membangkitkan upaya untuk mewujudkan system jaminan sosial yang berkelanjutan untuk industry garmen yang lebih adil dan berketahanan.

Secara spesifik, para penandatangan Call to Action berkomitmen untuk “melibatkan Lembaga keuangan, pemerintah dan donor, untuk mendukung mobilisasi dana yang cepat dan inovatif melalui dana bantuan darurat, kredit dan pinjaman jangka Panjang untuk memberikan bantuan pendapatan cepat bagi para pekerja dan individu” (ILO, 2020m). Kelompok ini telah mengidentifikasi kelompok negara prioritas –Bangladesh, Kamboja, Ethiopia, Haiti, India, Indonesia, Myanmar dan Pakistan—yang paling membutuhkan dana pemulihan (ILO, 2020n). Kelompok Call to Action di tingkat nasional juga sudah dibentuk dan berbagai aksi prioritas termasuk identifikasi kebutuhan industry yang berkaitan dengan bantuan pendapatan dan keberlanjutan bisnis, dan pelibatan pemerintah dan Lembaga keuangan internasional untuk mempercepat akses terhadap keuangan.

Pada bulan Mei 2020, Industrial Workers Federation of Myanmar dan IndustriaALL mencapai sebuah kesepakatan dengan berbagai brand pakaian jadi Eropa untuk mengupayakan “perlindungan hilangnya gaji” para pekerja sektor pakaian jadi dari April hingga Juli. Kesepakatan ini juga mewajibkan para penandatangan untuk mendukung pengembangan jaminan sosial pada industry garmen dan mendorong kepatuhan dengan peraturan kesehatan dan keselamatan (IndustriaALL, 2020d). Akhirnya, brand and pemasok di proses ACT yang dipimpin oleh IndustriaALL berkomitmen untuk memajukan Panduan kebebasan berserikat ACT tahun 2019 (IndustriaALL, 2019)

## ► Kesimpulan: Langkah ke depan untuk industry garmen

Untuk menghadapi krisis COVID-19, ILO mengusulkan Kerangka Kebijakan dengan empat pilar, berdasarkan pada standar perburuhan internasional: (i) menstimulasi perekonomian dan ketenagakerjaan; (ii) membantu perusahaan, pekerjaan dan pendapatan; (iii) melindungi pekerja di tempat kerja; (iv) bergantung pada dialog sosial untuk solusi (lihat ILO, 2020h). seiring dengan berjalannya pandemic yang semakin memperburuk kesehatan

serta kesejahteraan sosial dan ekonomi populasi dunia, mobilisasi sumberdaya serta aksi pada empat pilar itu tetap menjadi hal penting untuk menjaga pekerjaan dan mata pencaharian, termasuk yang ada di sektor garmen. Dukungan berkelanjutan bagi perusahaan, serta perluasan jaminan sosial bagi semua merupakan hal penting dalam memitigasi dampak buruk krisis di rantai pasok garmen. Solusi perlu ditemukan untuk menjawab kebutuhan semua

22 Worker Rights Consortium: <https://www.workersrights.org/issues/covid-19/tracker/> Multi-stakeholder coalition: <https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/responsible-purchasing-practices/garment-industry-coalition-statement/>

23 Termasuk kewajiban brand membayar manufaktur untuk “barang yang sudah jadi dan barang yang sedang diproduksi”

pekerja di sektor tersebut termasuk perempuan yang menjadi mayoritas pada pekerjaan di sektor garmen.

ILO juga telah menyediakan berbagai perangkat untuk mendukung konstituentnya (lihat ILO, 2020o untuk informasi lebih lanjut). Program antara ILO-International Finance Corporations, Better Work memantau situasi negara-negara yang berpartisipasi, dan memberikan dukungan bagi pekerja, pabrik dan brands dalam menjawab krisis dan melindungi para pekerja. ILO juga menyelenggarakan forum untuk dialog, diskusi dan pertukaran informasi di industry ini serta mempublikasikan serangkaian panduan bagi pabrik yang bertujuan untuk mendukung ketahanan bisnis melalui pengelolaan alur kas yang lebih baik, diversifikasi pendapatan dan pasar, komunikasi tempat kerja, dan keselamatan serta efisiensi dalam produksi (ILO, 2020p).

ILO memfasilitasi dan mendukung Call to Action, sebuah inisiatif internasional multi-pemangku kepentingan yang bertujuan membangkitkan aksi di seluruh industry melindungi pendapatan pekerja, kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendukung pemberi kerja untuk dapat menyintas saat krisis COVID-19, dan bekerjasama dalam membangun system jaminan sosial yang berkelanjutan untuk industry yang lebih adil dan berketahanan. Call to Action merupakan contoh positif dari kolaborasi global industry, namun akan membutuhkan komitmen yang berkelanjutan dan aksi pemangku kepentingan yang terkoordinasi agar lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diniatkan.

Penurunan permintaan konsumen untuk garmen serta kewajiban menutup tempat kerja untuk menahan penyebaran virus, mengakibatkan penurunan produksi dan ketenagakerjaan sektor garmen yang turun tajam, telah mencatatkan penurunan yang tajam dibandingkan krisis keuangan 2008-09. Penurunan yang sangat dalam dan

kecepatan serta bentuk pemulihan sektor ini mungkin tidak akan terlihat (secara utuh) sampai tahun 2021 atau 2022. Para peneliti juga membutuhkan waktu dan data untuk mengukur apakah intervensi pemerintah dan industry efektif dan cukup mengentaskan krisis.

Mengingat betapa besarnya pandemic dan dampaknya sampai saat ini, industry garmen global mungkin akan menghadapi penyesuaian structural, dibentuk oleh tren yang sudah mengganggu sektor ini sebelum 2020. Seruan public untuk berpikir ulang mengenai rantai pasok garmen menuju kesetaraan yang lebih luas, inklusivitas dan keberlanjutan menjadi semakin kencang, sementara inovasi teknologi membentuk Kembali berbagai kemungkinan tentang bagaimana dan dimana produksi terjadi, dan peran Angkatan kerja di pabrik penting dalam proses ini. Rekonfigurasi industry juga mempertimbangkan berbagai tantangan dan menjawab kebutuhan investasi pada transportasi dan infrastruktur komunikasi, pembangkitan daya yang dapat diandalkan, Pendidikan dan pengembangan keterampilan, yang membatasi beralihnya industry kepada produk dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Penelitian dibutuhkan untuk lebih memahami scenario potensial sebagai hasil dari disrupsi yang diakibatkan oleh pandemic.

Masih perlu dilihat apakah industry garmen global pasca pandemic akan melalui restrukturisasi mendasar untuk membangun jalur baru—dan yang lebih berkelanjutan dan berketahanan—atau apakah akan Kembali ke scenario “business as usual”. Apapun proyeksi yang akan diambil oleh industry, para pekerja dan perusahaan akan menjadi yang terdepan dalam menghadapi dampak tersebut.

Menjadi upaya pemerintah pusat, pekerja dan pemberi kerja untuk bekerjasama dengan powerbroker industry lain untuk mencari solusi bersama untuk masa depan industry yang berpusat pada manusia—masa depan yang dapat mewujudkan janjinya menjadi kekuatan transformative untuk kebaikan sosial dan ekonomi di Asia dan Pasifik.

## ▶ Referensi

---

AFP. 2020. "Coronavirus: Sri Lanka Extends Lockdown through May 11." *Khaleej Times*, 1 May.

Amed, Imran, Achim Berg, Anita Balchandani, Saskia Hedrich, Felix Rölkens, Robb Young and Jakob E. Jensen. 2020. *The State of Fashion 2020 Coronavirus Update*, 47.

Anner, Mark. 2020. *Abandoned? The Impact of COVID-19 on Workers and Businesses at the Bottom of Global Garment Supply Chains*.

PennState Center for Global Workers' Rights CGWR, 27 March.

*Apparel Resources* News-Desk. 2020. "Government Proposal on Workers' Wage For April." *Apparel Resources* (Bangladesh), 30 April. Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA). 2020. "BGMEA Refutes Accusations." *The Guardian*, 11 July.

Beaumont, Peter. 2020. "Dfid Scheme Accused of Putting UK Aid In Pockets Of Wealthy Companies." *The Guardian*, 14 August. Better Buying Institute. 2020a. *Special Report, Payment and Terms and the Need for New Practices*.

———. 2020b. *Cost and Cost Negotiation and the Need for New Practices*.

Better Factories Cambodia. 2020. Forthcoming: *COVID-19 and the Garment Sector in Cambodia: Workers' Perspectives*. BGMEA representatives. 2020. Interview with Cornell New Conservations Project. 22 July.

Bhattacharjee, Partha Pratim and Tuhin Shubhra Adhikary. 2020. "Shutdown Likely to Stay till May 30." *The Daily Star*, 13 May.

Borrell, Josep. 2020. "'Team Europe'— Global EU Response to COVID-19 Supporting Partner Countries and Fragile Populations." EEAS - European External Action Service - European Commission, 11 April.

Business and Human Rights Resource Centre (BHRRC). 2020. "COVID-19 Tracker", available at: <https://covid19.business-humanrights.org>.

BR Web Desk. 2020. "SBP Introduces New Refinance Scheme to Avoid Layoff of Workers." Brecorder, 10 April. CARE. 2020. *Garment Worker Needs Assessment During COVID-19*. CARE International in Cambodia.

Cepeda, Mara. 2020. "House Approves P1.3-Trillion Economic Stimulus Package vs Pandemic." *Rappler*, 4 June.

Chew, Amy. 2020. "Coronavirus: Indonesian migrant workers urged not to return home." *South China Morning Post*, 31 March. Chheng, Niem. 2020. "Ministry to Study COVID-19 Effects Before Wage Talks." *Phnom Penh Post*, 20 July.

Clean Clothes Campaign. 2020. *Underpaid in The Pandemic: An Estimate of What the Garment Industry Owes its Workers*.

David, Sen. 2020. "90 Percent of Garment Workers Turn Up for Duty on New Year's Day." *Khmer Times*, 13 April.

DFDL. 2020a. "DFDL Cambodia: New Instruction on Suspension of Employment Contracts and NSSF Contribution Payments for Certain Enterprises Seriously Impacted by COVID-19." 22 April.

———. 2020b. "Myanmar Legal Update: COVID-19 – Important Employee-related Myanmar Laws & Compliance – 10 Key Questions." 1 April.

EconomyNext. 2020. "Sri Lanka Coronavirus Health Rules for Factory, Manufacturing Businesses." *EconomyNext*, 2 May.

European Commission. 2020. "Press Release on the Cambodia Loses Duty-Free Access to the EU Market". 12 August. Fair Fashion Think Tank. 2020. *Fair Fashion Think Tank COVID-19 Podcast*, June.

Fair Labor Association (FLA). 2020. "Country-Specific Updates on Provisions for Workers in Response to the COVID-19 Pandemic", available at: <https://www.fairlabor.org/blog/entry/country-specific-updates-provisions-workers-response-covid-19-pandemic>.

Fair Wear Foundation. 2020. "How Does Covid-19 Affect Women Garment Workers?", available at: <https://www.fairwear.org/covid-19-dossier/worker-engagement-and-monitoring/gender-analysis/>

- Fakhri, Syarifah R. 2020. "The New Normal: Indonesian Health Minister Issues COVID-19 Workplace Guidelines." *SSEK*, 27 May.
- Fibre2Fashion News Desk. 2020a. "Falling Textile-Garment Exports in Vietnam Threaten Jobs." *Fibre2Fashion*, 14 July.
- . 2020b. "EU Myan Ku Fund Pays Over 45,000 Myanmar Workers." *Fibre2fashion*, 13 August.
- Forstater, Maya. 2010. "Implications of the global financial and economic crisis on the textile and clothing sector", Sectoral Coverage of the Global Economic Crisis, International Labour Organization.
- Garment Manufacturers Association in Cambodia (GMAC) Representative. 2020. Interview with Cornell New Conservations Project (NCP). 23 July.
- Garment Worker Diaries. 2020. "Two Months On: The Impact of COVID-19 on Workers: Garment Worker Diaries." <https://workerdiaries.org>.
- Haider, Mehtab. 2020. "PM Imran Khan unveils Rs1.2tr relief package Fuels fall by Rs15 a litre." *The News*, 25 March.
- Hasnayeem, Nehal. 2020. "Fear of Disruption of Law and Order." *Bonik Barta*, 20 May.
- Hesan, Mehedi. 2020. "BB Creates Tk3,000cr Loan Fund for Workers' July Wages." *Dhaka Tribune*, 24 July.
- Illanperuma, Shiran. 2020. "Interview: Sri Lankan Exports Rebound Due to Gov't Policies: Official." *Xinhua Net*, 26 July.
- ILO. 2020a. *COVID-19 and Global Supply Chains: How the Jobs Crisis Propagates Across Borders*.
- . 2020b. *The effects of COVID-19 on trade and global supply chains*.
- . 2020c. *World Employment and Social Outlook Trends 2020*.
- . 2020d. *A Gender-Responsive Employment Recovery: Building Back Fairer*.
- . 2020e. *ILO Violence and Harassment Convention, 2019 No. 190: 12 ways It Can Support the COVID-19 Response and Recovery*.
- . 2020f. *Safe and Healthy Working Environments Free from Violence and Harassment*.
- . 2020g. *Application of International Labour Standards: 2020 Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, ILC109/III/B*.
- . 2020h. *ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work*. Fifth edition.
- . 2020i. "Press Release on the Plug Social Protection Gaps in Developing Countries to Prevent Future Crises, ILO says". 14 May.
- . 2020j. "Signing Ceremony of the Trade Unions and Employers' Associations Joint Commitment and Tripartite Discussion on Common Efforts to Support the Recovery of Indonesia's Export Oriented Garment/Footwear Sector amid the COVID-19 Pandemic. Seminar, 6 August.
- . 2020k. "Press Release on the Employers and workers join forces to reinstate the past glory of Indonesian garment and footwear industries". 11 August.
- . 2020l. "Country Policy Responses: COVID-19 and the World of Work", available at: <https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/country-responses/lang--en/index.htm#ID>
- . 2020m. "COVID-19: Action in the Global Garment Industry; Call to Action", available at: [https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS\\_742343/lang--en/index.htm](https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/sectoral/WCMS_742343/lang--en/index.htm).
- . 2020n. "Press Release on the Garment Industry Call to Action Identifies Priority Countries". 14 May.
- . 2020o. *COVID-19 and the Textiles, Clothing, Leather and Footwear Industries*.
- . 2020p. *Guides for Garment Factories to Build Resilience During and After COVID-19*.
- . 2018. 2018. "Gender Pay Gaps in the Garment, Textile and Footwear Sector", ILO Asia-Pacific Garment and Footwear Sector Research Note Issue 9.
- . 2017. *From Obligation to Opportunity: A Market Systems Analysis of Working Conditions in Asia's Garment Export Industry*.
- . 2016. *Wages and Productivity in The Garment Sector in Asia and the Pacific and the Arab States*.

ILO and BRAC, Bangladesh Rural Advancement Committee. 2020. *A Rapid Assessment in Times of COVID-19 of Workers and Workplaces in the RMG Sector*. International Labour Organization; BRAC.

*IndustriALL*. 2019. "Garment Workers, Suppliers And ACT Brands Agree on Freedom of Association Guideline". 15 November. *IndustriALL*. 2020a. "Tripartite Agreement to Protect Sri Lankan Workers." *IndustriALL*. 25 May.

———. 2020b. "Union Successfully Fights Mass Dismissals in Myanmar." *IndustriALL*. 11 August.

———. 2020c. "COVID-19 - An Existential Crisis for the Garment Industry." *IndustriALL*, 23 March.

———. 2020d. "Protecting Workers in Myanmar." *IndustriALL*. 14 May.

*IndustriALL* representative. 2020. Interview with Cornell New Conservations Project (NCP). 14 August.

Islam, Muhammad A. 2020. "Coronavirus Measures Give Bangladeshi Workers for Global Clothing Chains a Stark Choice: Disease or Starvation." *The Conversation*, 30 June.

ITUC. 2020. *2019 ITUC Global Rights Index*. International Trade Union Confederation.

Joint Apparel Association Forum (JAAF) representative. 2020. Interview with Cornell New Conservations Project (NCP). 4 August. Kementerian Perindustrian. 2020. *Permasalahan, Peluang, Tantangan & Strategi Peningkatan Ekspor TPT di Tengah Pandemi COVID-19*. Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Khambay, Alysha and Narayanasamy, Thulsi. 2020. *Union Busting & Unfair Dismissals: Garment Workers during COVID-19*. Business & Human Rights Resource Centre.

*Khmer Times*. 2020. "Savagely Battered Cambodia's Garment Industry Seeks Urgent Help to Stay Alive." *Khmer Times*, 15 July. Lu, Sheng. 2019. "WTO Reports World Textile and Apparel Trade in 2018." *FASH455 Global Apparel & Textile Trade and Sourcing*, 16 August.

———. 2020. "COVID-19 and U.S. Apparel Imports Updated: May 2020." *FASH455 Global Apparel & Textile Trade and Sourcing*, 6 May.

Mau, Dhani. 2020. "All the Fashion and Beauty Brand Closures and Bankruptcies Caused by the Pandemic." *Fashionista*, 17 August.

Maung, Ye Yint K. 2020. "COVID-19 Weaponized Against Unionists in Myanmar." *Tea Circle Oxford*, 9 July 2020.

Medina, Ayman F. 2020a. "Cambodia Issues Regulations for Businesses Impacted by COVID-19 and EBA." *ASEAN Business News*, 11 March.

———. 2020b. "Indonesia Issues Second Stimulus Package to Dampen COVID-19 Impact." *ASEAN Business News*, 18 March.

———. 2020c. "ASEAN Incentives to Counter COVID-19 Impact." *ASEAN Business News*, 20 March.

Mirdha, Refayet U. 2020a. "Orders are Finally Trickling in, But Garment Factories are Still Reaching Out for The Axe." *The Daily Star*, 14 July.

———. 2020b. "Misleading, Exaggerated, Dated." *The Daily Star*, 30 August.

Moniroth, Morm. 2020. "Close-Quarter Commutes, Covid-19 Risks Leave Garment Workers Worried." *VOD*, 8 May. Nagaraj, Anuradha. 2020. "With Creches Shut, Mothers Forced Out of Garment Factory Jobs in India." *Reuters*, 30 June. New Age. 2019. "Female RMG Workers in Bangladesh Deprived of Maternity Benefits: Study." *New Age*, 20 October.

Nguoi Lao Dong. 2020. "Không tăng lương tối thiểu vùng năm 2021?" *Thu Vien Phap Luat*, 6 August.

Nguyen, Huong. 2020. "Matsuo Corporation Highlights Vietnam's Appeal to Japanese PPE Manufacturers." *Vietnam Investment Review*, 3 August.

Nguyen, Jason and Quan Le. 2020. "Vietnam's Textile and Garment Industry Hit Hard By COVID-19." *East Asia Forum*, 19 May. Nilsson, Patricia and Emiko Terazono. 2020. "Can Fast Fashion's \$2.5tn Supply Chain Be Stitched Back Together?" *Financial Times*, 17 May.

Nitta, Yuichi. 2020. "Suu Kyi Bets on Coronavirus Stimulus With Little Room For Error." *Nikkei Asian Review*. 13 April.

Ovi, Ibrahim H. 2020. "Home Minister: RMG Workers Cannot Leave Workplaces During Eid Holidays." *Dhaka Tribune*, 16 July.

Oxfam. 2020. *Power, Profits, and the Pandemic: From Corporate Extraction for the Few to an Economy That Works For All*. Oxfam International. <https://www.oxfam.org/en/research/power-profits-and-pandemic>

Paton, Elizabeth. 2020. "Garment Workers in Unions Fear for Their Jobs." *The New York Times*, 8 May.

*Peoples Dispatch*. 2020. "Union Intervention Wins Back Garment Workers' Jobs in Myanmar." *Peoples Dispatch*, 12 August.

Peytermann, Lucie and Hughes, Eléonore. 2020. "Cambodia Tightens Repression Under Virus Cover: Rights Groups." *The Jakarta Post*, 10 July.

Philippines Department of Finance. 2020. "Gov't Economic Team Rolls Out P27.1 B Package vs COVID-19 Pandemic." *News & Views*, 16 March.

Philippines Department of Labor and Employment (DOLE). 2020. "Labor Advisory No. 12."

Politzer, Malia. 2020. "We Are On Our Own: Bangladesh's Pregnant Garment Workers Face the Sack." *The Guardian*, 9 July.

Reaksmey, Hul. 2020. "Garment Manufacturers Want to Delay 2021 Minimum Wage Negotiations Due to COVID-19." *VOA*, 25 June.

Rehman, Zia. U. 2020. "Sindh Govt Bars Employers from Laying Off Workers During Lockdown Period." *The News*, 24 March.

Remington, Chris. 2020. "Countries Urged to Back EU's Cambodia Action." *Ecotextile News*, 24 July.

*RMG Bangladesh*. 2020a. "Lager Units Hope to Achieve 80% Of Annual Target Due to Less Work Orders." *RMG Bangladesh*, 14 July.

———. 2020b. "About 600 RMG Factories at Risk of Unrest Before Eid-UI-Adha." *RMG Bangladesh*, 23 July. Salaverria, Leila and Melvin Gascon. 2020. "Relief Funds ere Displaced Workers Sought." *Inquirer News*, 15 March. Sedex. 2020. *Sedex Insights Report COVID-19 Impacts on Businesses*.

SM Web Desk. 2020. "Details of Tripartite Agreement Reached To Pro-Rate Wages." *The Morning - Sri Lanka News*, 9 May.

Society for Labour and Development (SLD). 2020. *Garment Workers in India's Lockdown*.

Sovuthy, Khy. 2020. "Garment Factories Accused of Union Busting Under Cover of COVID-19." *Camboja News*, 22 May.

Sutrisno, Budi. 2020. "Indonesia's Strategy to Combat COVID-19: What We Know So Far." *The Jakarta Post*, 3 April.

The Economist. 2020. "The Philippines' Fierce Lockdown Drags On, Despite Uncertain Benefits." *The Economist*, 11 July. *The Fashion Law*. 2020. "Retail Woes: A Running List of Fashion Bankruptcies." *The Fashion Law*, 23 July.

*Times Online*. 2020. "COVID-Hit Sri Lanka Not Ready to be Open for Work." *Times Online*, 22 April.

Uddin, Akm Z. 2020. "Garment Workers' Salary Disbursement from Stimulus Package Starts from Today." *The Daily Star*, 3 May.

UN Women. 2020. *COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls*. UN Women.

Vietnam Textile and Apparel Association (VITAS) representative. 2020. Interview with Cornell New Conservations Project (NCP). 10 August.

WageIndicator. 2020. "Corona Factory Survey Report." DecentWorkCheck.Org. <https://decentworkcheck.org/company-overviews/garment-factories-in-indonesia/garment-indonesia-data-visuals-covid-19-impact>

Wathan, Min. 2020. "Myanmar Minimum Wage Decision Faces Three-Month Delay." *The Myanmar Times*, 20 May. *Xinhua*. 2020. "Team Europe Mobilizing 443 Mln Euros to Support Cambodia in COVID-19 Crisis." *Xinhua*, 11 June.

## ► Appendix 1: Government responses

► Table A1. Overview of government responses, selected countries in Asia and the Pacific

Country	Shutdowns, exemptions	Income/wage payments, supports <sup>24</sup>	Employment protection	COVID-19 related worker sick leave	Industry liquidity, subsidy
<b>Bangladesh</b>	Factory closures until 31 May 2020 but approx. 2,000 factories reopened in late April 2020 (Adhikary & Bhattacharjee, 2020)	60 per cent of wages to be paid for furloughed workers in April-July 2020 (Apparel Resources News-Desk, 2020), which corresponds to US\$57 based on current minimum wage of US\$95 per month for the ready-made-garments sector	Employers were not to terminate any worker before Eid holiday at end of July 2020 (Apparel Resources News-Desk, 2020)	Workers ordered to stay in factory areas during Eid festival (Ovi, 2020)	Government and private lending for wage payments until March 2021, at below-market, subsidized interest rates with two-year repayment (Udin, 2020; Hesan, 2020)
<b>Cambodia</b>	No official shutdown (David, 2020)	Government to pay US\$40 per month and requests the payment of US\$30 per month from employers until end of September 2020 for suspended workers, which together corresponds to 37 per cent of the garment sector minimum wage (US\$190)	Worker contract suspension terms eased, (partial wage payments maintained) and social insurance contributions suspended until Oct 2020 (DFDL, 2020a; Sutrisno, 2020)	Workers can receive paid sick leave with a doctor's note; will receive 100 per cent of wages during first month, 60 per cent during months 2-3; months 4-6 are unpaid (FLA, 2020).	Reduction (30 per cent) of corporate income tax payments up to 12 months (Feb 2021) (Medina, 2020a).
<b>Indonesia</b>	National social distancing mandated (March 2020), followed by provincial actions, but no lockdown ordered (Chew, 2020)	Social Security agency wage supports paid for 3 months, varying by province; West Java set at US\$68 equal to 55 per cent of the minimum wage (ILO, 2020)	n/a	Sick leave at 100 per cent of wage for 4 months for suspected or actual COVID-19 cases	Reduction of corporate (30 per cent) and worker (100 per cent) income taxes for 6 months (Oct 2020) (Medina, 2020b)
<b>Myanmar</b>	Factories ordered closed 12-30 April; reopened in May with inspections	EU-funded wage supports for impacted garment workers of on average US\$55 per month for April-June 2020, which corresponds to 65 per cent of the minimum wage; minimum-wage setting is postponed until September 2020 at the earliest (Wathan, 2020)	n/a	Sick leave of 30 days per year to include COVID-19 illness (Wathan, 2020); medical treatment for workers (including quarantine) extended to 12 months with 60 per cent of wages up to 12 months (ILO, 2020)	Government-subsidized loans to industry with interest rate of 1 per cent (Nitta, 2020)
<b>Pakistan</b>	March 2020 lockdown eased in April 2020	Wage supports of US\$18 provided to dismissed workers (Haider, 2020); although the government decreed that lay-offs are prohibited during lockdown with workers entitled to full minimum wage (ILO, 2020)	National government issued "no lay-off" order and full salary payments by employers during closure/ lockdown (ILO, 2020)	Sick leave of 16 days at 50 per cent of pay and 10 days of casual leave with full pay (Rehman, 2020)	Government offers loan deferrals and interest rate reductions for employers maintaining workforce and payroll (BR Web Desk, 2020)

24 Data on minimum wages are taken from the WageIndicator minimum wage rates, available at: <https://wageindicator.org/salary/minimum-wage>.

Country	Shutdowns, exemptions	Income/wage payments, supports <sup>24</sup>	Employment protection	COVID-19 related worker sick leave	Industry liquidity, subsidy
<b>Philippines</b>	March 2020 lockdown and social distancing; partially relaxed in June 2020; restrictions expected until July 2020 in some areas (The Economist, 2020)	CAMP stimulus program makes US\$103 payment, one time for all with reduced, suspended work, which corresponds to 68 per cent of US\$151 per month minimum wage in central Luzon (Philippines DOLE, 2020); social security program covers unemployment benefits (Philippines Department of Finance, 2020)	n/a	Additional sick leave counted against annual leave	ARISE stimulus package offers large employers wage subsidies, cash-for-work for displaced workers, zero interest loans, and loan guarantees for banks (Cepeda, 2020)
<b>Sri Lanka</b>	March 2020 partial lockdown eased in May 2020 but Free Trade Zone (FTZ) work continued (AFP, 2020; Illanperuma, 2020)	Days lost to COVID-19 impacts paid at 50 per cent of basic wage or at least US\$78 (SM Web Desk, 2020); current minimum wage in garment sector is between US\$66 and US\$82	n/a	n/a	FTZ and export processing designated "essential" and hence exempted from lockdown (Illanperuma, 2020)
<b>Viet Nam</b>	March 2020 lockdown eased in late April 2020	Dismissed workers receive VND 1 million (US\$43 per month), for 3 months; furloughed workers or those with fewer hours receive VND 1.8 million (US\$77 per month); employers must match government contribution and total wages received cannot be lower than 85 per cent of regional minimum wage (ILO, 2020); National Wage Council has voted not to increase the regional minimum wage in 2021, but the decision is pending government approval (Nguoi Lao Dong, 2020)	n/a	Leave without pay in lieu of lay-offs	Employers receive tax breaks, including delayed tax and land-use fees payments for five months; interest rates reduced by 0.5-1 percentage points; suspended social benefit contributions (Medina, 2020c)



Sweden  
Sverige

Decent Work in Garment Supply Chains Asia project

Contact details

ILO Regional Office for Asia and the Pacific

United Nations Building  
Rajdamnern Nok Avenue  
Bangkok 10200, Thailand

T: +66 2288 1234  
F: +66 2280 1735  
E: BANGKOK@ilo.org  
W: www.ilo.org/asiapacific